



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 47 ayat (3) Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Sungai Manau Tahun 2024-2044.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 32); dan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU TAHUN 2024-2044

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disebut Provinsi adalah Provinsi Jambi
3. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Merangin.
6. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
9. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan na kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
10. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
11. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
12. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
15. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasinya.
17. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
18. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
22. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
24. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman yang meliputi jalan, saluran air minum, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan listrik, dan telekomunikasi.
25. Sarana adalah kelengkapan kawasan permukiman yang berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum.
26. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
27. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional baik lindung maupun budidaya serta memiliki ciri tertentu.
28. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
29. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
30. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi

sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

31. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
32. Kavling atau Persil adalah bidang lahan yang telah ditetapkan batas-batasnya sesuai dengan batas kepemilikan lahan secara hukum/legal di dalam blok atau Sub-Blok.
33. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
34. Sub-Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani Sub-WP.
35. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
36. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
37. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
38. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
39. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, dan antar pusat kegiatan lingkungan.
40. Jalan Lingkungan Primer adalah Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
41. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
42. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
43. Jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
44. Halte adalah Tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
45. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 35 (tiga

puluh lima) kilovolt sampai dengan 245 (dua ratus empat puluh lima) kilovolt.

46. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
47. Gardu Distribusi adalah subsistem dari sistem distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
48. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
49. Menara Base Transceiver Station (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
50. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
51. Jaringan Irigasi Sekunder adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
52. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
53. Bendungan adalah bangunan yang berupaurukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batuyang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
54. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
55. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
56. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
57. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
58. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
59. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

60. Jaringan Drainase Primer Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
61. Jaringan Drainase Sekunder Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
62. Jaringan Drainase Tersier Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder
63. Bagunan Peresapan (Kolam Retensi) adalah Sarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
64. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
65. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
66. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
67. Jalur Sepeda adalah jalur yang khusus diperuntukan untuk lalu lintas pengguna sepeda dan kendaraan yang tidak bermesin yang memerlukan tenaga manusia, dipisahkan dari lalu lintas kendaraan bermotor untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pengguna sepeda.
68. Jalur Pejalan Kaki adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
69. Tanggul Penahan Longsor adalah bangunan pematang besar di tepi sungai dan/atau lainnya yang bersifat mengikat atau menahan massa tanah yang bergerak.
70. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
71. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
72. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

73. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
74. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan
75. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
76. Zona Badan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
77. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
78. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP adalah Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
79. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah Peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
80. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah Peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
81. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
82. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
83. Zona Perumahan dengan kode R adalah Peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
84. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
85. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian

dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

86. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, peribadatan, dan sosial budaya, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan.
87. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
88. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
89. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
90. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
91. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempatbekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
92. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
93. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP.
94. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
95. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.

96. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah zona yang didalamnya berupa sub-zona peruntukan Tempat Evakuasi Akhir, Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Pengembangan Nuklir, Pergudangan
97. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 adalah Peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
98. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
99. Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Lantai Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan, ketinggian bangunan, dan Koefisien Dasar Hijau, tiap kawasan bagian kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.
100. Koefisien Dasar Bangunan adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
101. Koefisien Lantai Bangunan adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
102. Koefisien Daerah Hijau adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
103. Ketinggian Bangunan adalah jumlah lantai penuh dalam suatu bangunan dihitung mulai lantai dasar sampai dengan lantai tertinggi yang diarahkan untuk terciptanya komposisi pemanfaatan lahan di dalam suatu kaveling tertentu.
104. Garis Sempadan Bangunan adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor atau riol sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.
105. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang memiliki karakteristik rawan bencana.
106. Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan untuk dapat mendorong perkembangan kota terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau

mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

107. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
108. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
109. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
110. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau online single submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
111. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
112. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
113. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah pusat untuk mengatur pendapatan dan belanja negara.
114. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah provinsi untuk mengatur pendapatan dan belanja di tingkat provinsi.
115. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk mengatur pendapatan dan belanja di tingkat kabupaten/ kota.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup WP meliputi:
 - a. tujuan penataan Wilayah Perencanaan;
 - b. rencana struktur ruang;
 - c. rencana pola ruang;
 - d. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
 - e. peraturan zonasi.

- (2) Lingkup WP sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Lingkup WP berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan 1.659,09 (seribu enam ratus lima puluh sembilan koma nol sembilan) hektare, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi menurut peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Batas-batas wilayah perencanaan Perkotaan Sungai Manau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif meliputi :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tabir Barat;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Renah Pembarap;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Jambu; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Muara Siau.
- (3) WP Perkotaan Sungai Manau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif meliputi :
- a. Kecamatan Sungai Manau seluas 1.389,57 (seribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma lima tujuh) hektare meliputi keseluruhan wilayah ;
 1. Desa Bukit Batu seluas 128,77 (seratus dua puluh delapan koma tujuh tujuh) hektare ,
 2. Desa Sungai Nilau seluas 172,45 (seratus tujuh puluh dua koma empat lima) hektare,
 3. Desa Sungai Pinang seluas 99,88 (sembilan puluh sembilan koma delapan delapan) hektare,
 4. Desa Palipan seluas 141,52 (seratus empat puluh satu koma lima dua) hektare,
 5. Desa Seringat seluas 214,37 (dua ratus empat belas koma tiga tujuh) hektare,
 6. Desa Tiangko seluas 151,93 (seratus lima puluh satu koma sembilan tiga) hektare,
 7. Desa Sungai Manau seluas 182,16 (seratus delapan puluh dua koma satu enam) hektare,
 8. Desa Durian Lecah seluas 49,54 (empat puluh sembilan koma lima empat) hektare,
 9. Desa Benteng seluas 133,71 (seratus tiga puluh tiga koma tujuh satu) hektare, dan
 10. Desa Gelanggang seluas 115,24 (seratus lima belas koma dua empat) hektare;
 - b. Kecamatan Renah Pembarap seluas 246,66 (dua ratus empat puluh enam koma enam enam) hektare meliputi sebagian wilayah ;

1. Desa Talang Segegah seluas 85,93 (delapan puluh lima koma sembilan tiga) hektare,
 2. Desa Muaro Panco Barat seluas 89,25 (delapan puluh sembilan koma dua lima) hektare, dan
 3. Desa Muaro Panco Timur seluas 71,48 (tujuh puluh satu koma empat delapan) hektare; dan
 - c. Kecamatan Pangkalan Jambu seluas 22,86 (dua puluh dua koma delapan enam) hektare meliputi sebagian wilayah Desa Tanjung Mudo seluas 22,86 (dua puluh dua koma delapan enam) hektare.
- (4) Wilayah perencanaan Perkotaan Sungai Manau merupakan satu kesatuan wilayah perencanaan yang selanjutnya disingkat WP yang di bagi menjadi 3 (tiga) Sub wilayah perencanaan yang di singkat SWP sebagai berikut :
- a. SWP A dengan luas 886,61 (delapan ratus delapan puluh enam koma enam satu) hektare berada di ;
 1. Desa Sungai Manau;
 2. Desa Benteng;
 3. Desa Muaro Panco Barat;
 4. Desa Talang Segegah;
 5. Desa Muaro Panco Timur;
 6. Desa Sungai Nilau;
 7. Desa Bukit Batu; dan
 8. Desa Tanjung Mudo.
 - b. SWP B dengan luas kurang lebih 316,71 (tiga ratus enam belas koma tujuh satu) hektare berada di :
 1. Desa Durian Lecah;
 2. Desa Gelanggang; dan
 3. Desa Tiangko.
 - c. SWP C dengan luas kurang lebih 455,77 (empat ratus lima puluh lima koma tujuh tujuh) hektare berada di :
 1. Desa Seringat;
 2. Desa Pelipan; dan
 3. Desa Sungai Pinang.
- (5) SWP Perkotaan Sungai Manau sebagaimana dimaksud ayat (4) dibagi menjadi blok yang terdiri dari :
- a. SWP A dibagi menjadi 5 (lima) blok yaitu :
 1. Blok I.A.1 di Kawasan Desa Muaro Panco Barat, Kawasan Desa Talang Segegah dan Kawasan Desa Muaro Panco Timur seluas 246,66 (dua ratus empat puluh enam koma enam enam) hektare;
 2. Blok I.A.2 di Kawasan Desa Benteng seluas 133,71 (seratus tiga puluh tiga koma tujuh satu) hektare;
 3. Blok I.A.3 di Kawasan Desa Sungai Manau seluas 182,16 (seratus delapan puluh dua koma satu enam) hektare;
 4. Blok I.A.4 di Kawasan Desa Sungai Nilau seluas 172,45 (seratus tujuh puluh dua koma empat lima) hektare; dan

5. Blok I.A.5 di Kawasan Desa Bukit Batu, dan di Kawasan Desa Tanjung Mudo seluas 151,63 (seratus lima puluh satu koma enam tiga) hektare.
 - b. SWP B dibagi menjadi 3 (tiga) blok yaitu :
 1. Blok I.B.1 di Kawasan Desa Durian Lecah seluas 49,54 (empat puluh sembilan koma lima empat) hektare;
 2. Blok I.B.2 di Kawasan Desa Gelanggang seluas 115,24 (seratus lima belas koma dua empat) hektare; dan
 3. Blok I.B.3 di Kawasan Desa Tiangko seluas 151,93 (seratus lima puluh satu koma sembilan tiga) hektare.
 - c. SWP C dibagi menjadi 3 (tiga) blok yaitu :
 1. Blok I.C.1 di Kawasan Desa Seringat seluas 214,37 (dua ratus empat belas koma tiga tujuh) hektare;
 2. Blok I.C.2 di Kawasan Desa Palipan seluas 141,52 (seratus empat puluh satu koma lima dua) hektare; dan
 3. Blok I.C.3 di Kawasan Desa Sungai Pinang seluas 99,88 (sembilan puluh sembilan koma delapan delapan) hektare.
- (6) Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Perkotaan Sungai Manau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bertujuan untuk Mewujudkan WP Perkotaan Sungai Manau yang maju dari sektor Pariwisata, Pertanian serta Perdagangan dan Jasa secara berkelanjutan dengan memperhatikan kearifan lokal dan berwawasan Lingkungan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan;
 - b. Rencana Jaringan Transportasi;
 - c. Rencana Jaringan Energi;
 - d. Rencana Jaringan Telekomunikasi;
 - e. Rencana Jaringan Sumber Daya Air;

- f. Rencana Jaringan Air Minum;
 - g. Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah B3;
 - h. Rencana Jaringan Persampahan;
 - i. Rencana Jaringan Drainase ; dan
 - j. Rencana Jaringan Prasarana Lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub-Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Sungai Manau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, berada di SWP A Blok I.A.3
- (3) Sub-Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Benteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, berada di SWP A Blok I.A.2
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa berada di :
 - 1. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Muaro Panco Barat di SWP A Blok I.A.1;
 - 2. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Sungai Nilau berada di SWP A Blok I.A.4;
 - 3. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Bukit Batu berada di SWP A Blok I.A.5;
 - 4. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Durian Lecah berada di SWP B Blok I.B.1;
 - 5. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Gelanggang berada di SWP B Blok I.B.2;
 - 6. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Tiangko berada di SWP B Blok I.B.3;
 - 7. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Seringat berada di SWP C Blok I.C.1;
 - 8. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Palipan berada di SWP C Blok I.C.2; dan
 - 9. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Sungai Pinang berada di SWP C Blok I.C.3.

- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. jembatan; dan
 - d. halte.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jalan Kolektor Primer;
 - b. Jalan Kolektor Sekunder;
 - c. Jalan Lokal Primer;
 - d. Jalan Lingkungan Primer; dan
 - e. Jalan Lingkungan Sekunder.
- (3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Bts. Kota Bangko - Sei Manau berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 - b. Sei Manau – Bts. Kab. Merangin/Kab. Kerinci berada di SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5.
- (4) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi Jalan Sungai Manau - Sungai Pinang yang berada di :
- a. SWP A Blok I.A.3; dan
 - b. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (5) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. Jalan Simpang Tiangko – Tiangko berada di SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - b. Jalan Simpang Muaro Panco - Simpang Renah Medan berada di SWP A Blok I.A.1;
 - c. Jalan Muaro Panco - Talang Segegah berada di SWP A Blok I.A.1;
 - d. Jalan Alternatif Pasar Sungai Manau berada di SWP A Blok I.A.2;
 - e. Jalan Simpang Gelanggang – Durian Lecah berada di:
 1. SWP A Blok I.A.2;
 2. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan

3. SWP C Blok I.C.1.
- f. Jalan Pesantren Durian Hijau berada di SWP A Blok I.A.1.
- (6) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. Jalan Desa Benteng ke Desa Muaro Panco Barat berada di SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. Jalan Desa Benteng ke Durian Lecah berada di SWP B Blok I.B.1;
 - c. Jalan Desa Bukit Batu ke Desa Palipan berada di :
 - 1. SWP A Blok I.A.5; dan
 - 2. SWP C Blok I.C.2.
 - d. Jalan Desa Gelanggang ke Desa Tiangko berada di SWP Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - e. Jalan Desa Seringat berada di SWP C Blok I.C.1;
 - f. Jalan Desa Sungai Manau ke Desa Gelanggang berada di:
 - 1. SWP A Blok I.A.3; dan
 - 2. SWP B Blok I.B.2.
 - g. Jalan Desa Tanjung Mudo berada di SWP A Blok I.A.5; dan
 - h. Jalan Lingkar Pasar Sungai Manau berada di SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3.
- (7) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Terminal Penumpang Tipe C berada di SWP A Blok I.A.3.
- (9) Jembatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP B Blok I.B.1; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (10) Halte sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3 dan Blok I.A.5.
- (11) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan Distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) meliputi :
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, berupa Gardu Distribusi terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Jaringan Serat Optik berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP B Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.2.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan

detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. jaringan irigasi primer; dan
 - b. jaringan irigasi sekunder.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
 - a. SWP A Blok I.A.5;
 - b. SWP B Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C Blok I.C.2.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bangunan Pengendalian Banjir terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP B Blok I.B.1; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Bendungan terdapat di :
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok I.A.5.
 - b. SWP B Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (7) Rencana jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. unit produksi; dan
 - b. unit distribusi.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Instalasi Produksi yang terdapat di SWP C Blok I.C.1.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Jaringan Distribusi Pembagi yang berada di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (5) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bangunan Penangkap Mata Air yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.4;
 - b. SWP B Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
- (6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - b. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman yang terdapat di SWP A Blok I.A.1.
- (3) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdapat di SWP A Blok I.A.3.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail

informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok 4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (3) Rencana jaringan Persampahan, dimaksud ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi :
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. bangunan peresapan (kolam retensi).
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di :
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP B Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di:
 - a. SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3

- (5) Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada di:
 - a. SWP A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; dan
 - b. SWP C Blok I.C.1
- (6) Rencana jaringan drainase, dimaksud ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda;
 - d. jaringan pejalan kaki; dan
 - e. tanggul penahan longsor.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (3) huruf a, berada di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (5) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di SWP A Blok I.A.3.
- (6) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (1) huruf c berada di :
 - a. SWP A Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1.
- (7) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di SWP B Blok I.B.3.
- (8) Tanggul Penahan Longsor, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di:

- a. SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP B Blok I.B.1; dan
 - c. SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi rencana:
- a. Rencana Zona Lindung; dan
 - b. Rencana Zona Budi Daya.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;

Paragraf 1 Zona Badan Air

Pasal 18

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, seluas 94,83 (sembilan puluh empat koma delapan tiga) hektare, berada di :

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;

- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
- c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, seluas 52,84 (lima puluh dua koma delapan empat) hektare, berada di:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
- c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, seluas 12,95 (dua belas koma sembilan lima) hektare, meliputi:
 - a. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - b. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4; dan
 - c. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 4,18 (empat koma delapan belas) hektare terdapat di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3.
- (3) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 3,97 (tiga koma sembilan tujuh) hektare, berada di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (4) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 4,80 (empat koma delapan nol) hektare berada di :
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
Paragraf 1

Pasal 21

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP
- c. Zona Pertanian dengan kode P;
- d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- e. Zona Pariwisata dengan kode W;
- f. Zona Perumahan dengan kode R;
- g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- i. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- j. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
- k. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL.

Paragraf 2

Zona Badan Jalan

Pasal 22

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, seluas 17,36 (tujuh belas koma tiga enam) hektare, berada di :

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
- c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

Paragraf 3

Zona Hutan Produksi

Pasal 23

Zona Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, berupa Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP seluas 0,58 (nol koma lima delapan) hektare, berada di SWP A Blok I.A.1.

Paragraf 4

Zona Pertanian

Pasal 24

(1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf c, seluas 1.139,90 (seribu seratus tiga puluh sembilan koma sembilan nol) hektare, meliputi:

- a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
- b. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3.

- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 565,40 (lima ratus enam puluh lima koma empat nol) hektare berada di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (3) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 574,50 (lima ratus tujuh puluh empat koma lima nol) hektare berada di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

Paragraf 5

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 25

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, seluas 0,45 (nol koma empat lima) hektare berada di SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.

Paragraf 6

Zona Pariwisata

Pasal 26

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, seluas 5,22 (lima koma dua dua) hektare berada di SWP B Blok I.B.3.

Paragraf 7

Zona Perumahan

Pasal 27

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, seluas 260,55 (dua ratus enam puluh koma lima lima) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 229,39 (dua ratus dua puluh sembilan koma tiga sembilan) hektare berada di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;

- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 31,16 (tiga puluh satu koma satu enam) hektare berada di :
- a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

Paragraf 8

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 28

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, seluas 18,24 (delapan belas koma dua empat) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 4,38 (empat koma tiga delapan) hektare berada di:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 2,62 (dua koma enam dua) hektare berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 9,33 (sembilan koma tiga tiga) hektare berada di:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (5) Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 1,91 (satu koma sembilan satu) hektare berada di:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

Paragraf 9

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 29

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h, seluas 51,70 (lima puluh satu koma tujuh nol) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1; dan
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 45,02 (empat puluh lima koma nol dua) hektare berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 6,68 (enam koma enam delapan) hektare berada di SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3.

Paragraf 10
Zona Perkantoran

Pasal 30

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i, seluas 3,93 (tiga koma sembilan tiga) hektare berada di:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
- c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.

Paragraf 11
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 31

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j, seluas 0,35 (nol koma tiga lima) hektare terdapat Koramil 420-07/Sei Manau berada di SWP A Blok I.A.2.

Paragraf 12
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 32

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k, berupa Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3 seluas 0,20 (nol koma dua nol) hektare berada di SWP C Blok I.C.1.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Wilayah Perencanaan Perkotaan Sungai Manau Tahun 2024-2044.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ; dan
 - b. Program perwujudan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 35

- (1) Program perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b merupakan upaya perwujudan RDTR dalam bentuk program pengembangan WP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) huruf b berisi:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. waktu dan tahapan pelaksanaan;
 - d. sumber pendanaan; dan
 - e. instansi pelaksana.
- (3) program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan meliputi:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang ;
- (4) Program perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

- a. perwujudan pengembangan pusat pelayanan;
 - b. perwujudan jaringan transportasi;
 - c. perwujudan jaringan energi;
 - d. perwujudan jaringan telekomunikasi;

 - e. perwujudan jaringan sumber daya air;
 - f. perwujudan jaringan air minum;
 - g. perwujudan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3;
 - h. perwujudan jaringan persampahan;
 - i. perwujudan jaringan drainase; dan
 - j. perwujudan jaringan prasarana lainnya.
- (5) Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Perwujudan zona lindung; dan
 - b. Perwujudan zona budi daya.
- (6) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi lokasi yang berada di lingkup WP Perkotaan Sungai Manau.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pelaksanaan program berdurasi 20 (dua puluh) tahun yang terdiri atas 5 (lima) program jangka menengah, meliputi:
- a. program jangka menengah 1 (satu) pada periode 2024;
 - b. program jangka menengah 2 (dua) pada periode 2025 – 2029;
 - c. program jangka menengah 3 (tiga) pada periode 2030 – 2034;
 - d. program jangka menengah 4 (empat) pada periode 2035 – 2039; dan
 - e. program jangka menengah 5 (lima) pada periode 2040 – 2044.
- (8) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Swasta dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi pelaksana program utama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Merangin, swasta, dan/atau masyarakat.
- (10) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung;
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona budi daya;
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4; dan
 - e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona budi daya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - b. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP;
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - d. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
 - e. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - f. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;
 - g. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - h. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - i. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;

- j. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan/Desa dengan kode SPU-3
- k. Sub-Zona sarana pelayanan umum Skala RW dengan kode SPU-4;
- l. Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;

- m. Sub-Zona Tanaman pangan dengan kode P-1;
- n. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3;
- o. Zona Pariwisata dengan kode W;
- p. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;
- q. Sub-Zona IPAM dengan kode PL-3.

Bagian Kedua Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 37

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T);
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B); dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dengan pengaturan pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) meliputi:
 - a. diperbolehkan secara terbatas hanya pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara badan usaha dan/ atau masyarakat dengan pemerintah daerah melalui rekomendasi dinas terkait dengan kode T1;
 - b. diperbolehkan secara terbatas dengan pembatasan luas dengan kode T2; dan
 - c. diperbolehkan secara terbatas dengan pembatasan jumlah pemanfaatan dengan kode T3.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dengan pengaturan pemanfaatan bersyarat tertentu (B) meliputi:
 - a. diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan kajian Lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/SPPL), dan wajib memenuhi persyaratan hasil kajian lingkungan hidup yang telah dilakukan sesuai rekomendasi dinas terkait dengan kode B1;
 - b. memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat dengan kode B2;
 - c. diperbolehkan dengan syarat wajib melalui rekomendasi FPR dan/atau TABG untuk bangunan gedung untuk umum, serta dilengkapi dengan jumlah rencana kapasitas pengguna dengan kode B3; dan
 - d. melakukan persyaratan sarana dan prasarana minimum berdasarkan Lampiran Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimal dengan kode B4.

- e. bersyarat rekomendasi dari instansi terkait dengan kode B5
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran XVI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

- (1) Klasifikasi intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan yang meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum; dan
 - d. luas kavling minimum.
- (2) Luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan zona perumahan dengan luas minimum bidang tanah seluas 120 (seratus dua puluh) meter persegi;
- (3) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona tabel intensitas pemanfaatan ruang WP Perkotaan Sungai Manau sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 39

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. ketinggian bangunan maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimum; dan
 - d. jumlah lantai maksimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum Lampiran XVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 40

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. ruang terbuka hijau;
 - b. utilitas perkotaan; dan
 - c. prasarana lingkungan.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana yang dipersyaratkan sesuai dengan zona atau Sub-zona tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 41

- (1) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau Sub-zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau overlay dengan fungsi zona dan atau Sub-zona lainnya, terdiri atas :
- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. kawasan rawan bencana;
 - c. tempat evakuasi bencana;
 - d. kawasan sempadan; dan
 - e. kawasan pertambangan mineral dan batubara
- (3) Lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 519,82 (lima ratus sembilan belas koma delapan dua) hektare sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang bertampalan dengan pola ruang Subzona P-1 berada di:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.
- (4) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
- a. penggunaan lahan di kawasan LP2B hanya untuk kegiatan pertanian pangan berkelanjutan dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang;
 - b. penggunaan lahan di kawasan LP2B untuk kegiatan lainnya selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah sarana dan prasarana, tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi, yang ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk;
 - c. penggunaan lahan di kawasan LP2B untuk kegiatan lainnya selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dilakukan setelah melalui kajian mendalam dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

- d. lahan yang ditetapkan sebagai LP2B dilarang untuk dialihfungsikan;
 - e. alih fungsi LP2B hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas (jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum/air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, Terminal; Fasilitas keselamatan umum; Cagar alam; dan/atau Pembangkit dan jaringan listrik) atau terjadi bencana yang ditetapkan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana;
 - f. alih fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. alih fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B kepada Bupati Merangin.
- (5) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. rawan bencana banjir;
 - b. rawan bencana banjir bandang;
 - c. rawan bencana tanah longsor; dan
 - d. rawan bencana gempa bumi.
- (6) Rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa rawan bencana banjir tingkat tinggi dan rawan bencana banjir tingkat sedang, yang bertampalan dengan pola ruang meliputi:
- a. Zona Perlindungan Setempat berada di ;
 - 1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5;
 - 2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau berada di ;
 - 1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5;
 - 2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.
 - c. Zona Perdagangan dan Jasa berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5.
 - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2.
 - e. Zona Perkantoran berada di ;
 - 1. SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.4 Blok I.A.5;
 - 2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan

3. SWP C Blok I.C.1.

- f. Zona Pertanian berada di ;
 - 1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5;
 - 2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
 - g. Zona Perumahan berada di ;
 - 1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5;
 - 2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
 - h. Zona Sarana Pelayanan Umum berada di ;
 - 1. SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5;
 - 2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
 - 3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
 - i. Zona Pariwisata berada di SWP B Blok I.B.3.
- (7) Ketentuan khusus rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) meliputi:
- a. Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang dalam pendirian bangunan yang terdiri atas:
 - 1) KDB maksimum adalah 60% (enam puluh persen); dan
 - 2) KDH minimum adalah 30% (tiga puluh persen).
 - b. Pembuatan sumur resapan atau biopori.
 - c. Dilengkapi jalur evakuasi;
 - d. Membuat penanaman pohon penyerap air;
 - e. Pembuatan kolam retensi/ kolam penampung air; dan
 - f. Rencanakan penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana.
- (8) Rawan bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi dan rawan bencana banjir bandang tingkat sedang, yang bertampalan dengan pola ruang meliputi:
- a. Zona Perlindungan Setempat berada di;
 - 1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5;
 - 2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau berada di ;
 - 1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3;
 - 2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.
 - c. Zona Perdagangan dan Jasa berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4. Blok I.A.5.

- d. Zona Pertanian berada di ;
 - 1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5;
 - 2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
 - e. Zona Perumahan berada di ;
 - 1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5;
 - 2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
 - f. Zona Sarana Pelayanan Umum berada di ;
 - 1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5;
 - 2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - 3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
 - g. Zona Perkantoran berada di ;
 - 1. SWP A Blok Blok I.A.4, Blok I.A.5,
 - 2. SWP B Blok I.B.1,
 - 3. SWP C Blok I.C.1.
- (9) Ketentuan khusus rawan bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) meliputi:
- a. Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang dalam pendirian bangunan yang terdiri atas:
 - 1) KDB maksimum adalah 60% (enam puluh persen); dan
 - 2) KDH minimum adalah 30% (tiga puluh persen).
 - b. Pembuatan sumur resapan atau biopori.
 - c. Dilengkapi jalur evakuasi;
 - d. Membuat penanaman pohon penyerap air;
 - e. Pembuatan kanal-kanal pengalih air; dan
 - f. Rencanakan penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana.
- (10) Rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berupa rawan bencana longsor tingkat tinggi dan rawan bencana longsor tingkat sedang, yang bertampalan dengan pola ruang meliputi:
- a. Zona Perlindungan Setempat berada di ;
 - 1. SWP A Blok I.A.1; dan
 - 2. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3.
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau berada di SWP C Blok I.C.3.
 - c. Zona Perumahan berada di ;
 - 1. SWP A Blok I.A.1 dan
 - 2. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3.
 - d. Zona Sarana Pelayanan Umum berada di ;
 - 1. SWP A Blok I.A.1 dan
 - 2. SWP C Blok I.C.3.
 - h. Zona Pertanian berada di ;

1. SWP A Blok I.A.1; dan
2. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3.

i. Zona Perkantoran berada di SWP C Blok I.C.3.

(11) Ketentuan khusus rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) meliputi:

- a. Tidak membangun di kelerengan tanah lebih dari 40% (empat puluh persen);
- b. Tidak membangun di kawasan rawan bencana tanah longsor;
- c. Memastikan perkuatan bangunan dengan mengikuti standard kualitas bangunan; dan
- d. Rencanakan penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana.

(12) Rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d berupa rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi dan rawan bencana gempa bumi tingkat sedang, yang bertampalan dengan pola ruang meliputi:

- a. Zona Perlindungan Setempat berada di ;
 1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5;
 2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
 3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau berada di ;
 1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5;
 2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
 3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
- c. Zona Pertahanan dan Keamanan berada di SWP A Blok I.A.2.
- d. Zona Perdagangan dan Jasa berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5.
- e. Zona Perkantoran berada di;
 1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4 Blok I.A.5;
 2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
 3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
- f. Zona Pertanian berada di ;
 1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5;
 2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
 3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
- g. Zona Peruntukan Lainnya berada di SWP C Blok I.C.1.
- h. Zona Perumahan berada di ;
 1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5;
 2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
 3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
- i. Zona Sarana Pelayanan Umum berada di;

1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5;
 2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
 3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
 - j. Zona Pariwisata berada di SWP B Blok I.B.3.
 - k. Zona Kawasan Peruntukan Industri berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2
- (13) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) meliputi:
- a. bangunan harus dibangun dengan konstruksi tahan getaran/gempa;
 - b. memastikan perkuatan bangunan dengan mengikuti standard kualitas bangunan;
 - c. Pembangunan fasilitas umum dengan standard kualitas yang tinggi;
 - d. Memastikan kekuatan bangunan-bangunan vital yang telah ada; dan
 - e. Rencanakan penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana.
- (14) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana seluas 1,61 (satu koma enam satu) hektare sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang bertampalan dengan pola ruang meliputi:
- a. Tempat evakuasi sementara ; dan
 - b. Tempat evakuasi akhir.
- (15) Tempat evakuasi sementara seluas 1,33 (satu koma tiga tiga) hektare sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a berada di :
- a. Zona Sarana Pelayanan Umum seluas 1,15 Ha (satu koma satu lima hektare) berada di ;
 1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4;
 2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.3.
 - b. Zona Perkantoran seluas 0,18 Ha (nol koma satu delapan hektare) berada di ;
 1. SWP A Blok I.A.5; dan
 2. SWP C Blok I.C.2.
- (16) Tempat evakuasi akhir seluas 0,28 (nol koma dua delapan) hektare sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b berada di Zona Sarana Pelayanan Umum berada di SWP A Blok I.A.3;
- (17) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (14) meliputi :
- a. Jalur evakuasi bencana dilengkapi dengan penanda atau rambu-rambu yang mengarahkan pada lokasi tempat evakuasi bencana.
 - b. Ketentuan Tempat Evakuasi Sementara meliputi :

- 1) Memperhatikan waktu tempuh ke lokasi Tempat Evakuasi Sementara maksimal 10 menit;
 - 2) Jarak tempuh ke lokasi Tempat Evakuasi Sementara sekitar 400-600 meter dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 - 3) Jenis tempat evakuasi dapat berupa RTH, lapangan sekolah, lapangan kantor, lapangan olahraga dan lapangan parkir.
- c. Ketentuan Tempat Evakuasi Akhir meliputi:
- 1) Lokasi Tempat Evakuasi Akhir berada di luar KRB (kawasan rawan bencana);
 - 2) Terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi;
 - 3) Standar minimal daya tampung ruang evakuasi minimal 3 m² per orang.
 - 4) Tempat Evakuasi Akhir menyediakan fungsi pemenuhan kebutuhan dasar, yang meliputi :
 - i. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - ii. pangan;
 - iii. sandang;
 - iv. pelayanan kesehatan;
 - v. pelayanan psikososial; dan
 - vi. penampungan serta tempat hunian.
- (18) Ketentuan khusus Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa kawasan sempadan sungai seluas 31,83 (tiga puluh satu koma delapan tiga) hektare yang berada di:
- a. Zona Perdagangan dan Jasa seluas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare berada di SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4;
 - b. Zona Pertanian seluas 30,07 (tiga puluh koma nol tujuh) hektare berada di ;
 1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blokk I.A.4 Blok I.A.5;
 2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3;
 3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3;
 - c. Zona Perumahan seluas 1,59 (satu koma lima sembilan) hektare berada di ;
 1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blokk I.A.4 Blok I.A.5;
 2. SWP B Blok I.B.1;
 3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.
- (19) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam ayat (18) meliputi :
- a. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. Tidak diperkenankan meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang;
 2. KDB maksimal 20% (dua puluh persen);
 3. KDH minimal 70% (tujuh puluh persen); dan

4. KLB maksimal 1 (satu).

- b. Ketentuan tata bangunan terdiri atas:
 - 1. Memperhatikan konsep ekologi;
 - 2. Ketinggian bangunan maksimal 1 lantai; dan
 - 3. GSB sebesar 50% (lima puluh persen)
 - c. Pemanfaatan diperbolehkan terdiri atas kegiatan RTH publik dan kegiatan pertanian;
 - d. Pemanfaatan ruang eksisting yang sudah terbangun dan/atau berizin namun tidak boleh ada pengembangan; dan
 - e. Pemanfaatan Ruang pada sempadan sungai yang sudah terbangun sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan ketentuan terbatas.
- (20) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa wilayah pertambangan rakyat seluas 61,44 (enam puluh satu koma empat empat) hektare yang berada di SWP C Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.
- (21) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (20), berupa wilayah pertambangan rakyat meliputi :
- a. kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat, yang bertampalan dengan badan air, kawasan pertanian selain Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), kawasan peruntukan industri, dan kawasan pertambangan dan energi, mengacu pada peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat yang bertampalan dengan kawasan hutan produksi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan konservasi selain kawasan konservasi yang berada di wilayah perairan laut mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - c. kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana mengacu pada peraturan perundang-undangan;
 - d. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
 - 1. pendidikan;
 - 2. penelitian; dan
 - 3. pariwisata.
 - e. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan industri; dan
 - 2. kegiatan penunjang pengolahan hasil pertambangan.
 - f. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat yang bertampalan dengan ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - 2. kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat, yang bertampalan dengan kawasan perlindungan

- setempat, kawasan hutan adat, kawasan lindung geologi, kawasan cagar budaya, dan kawasan permukiman; dan
3. kegiatan pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau dekat dengan permukiman penduduk.
 - g. tidak diperbolehkan lokasi penggalian pada lereng curam lebih besar dari 40% (empat puluh persen) dan kemantapan lerengnya kurang stabil untuk menghindari bahaya erosi dan longsor; dan
 - h. pemenuhan prasarana minimum berupa akses jaringan jalan menuju lokasi tambang.
- (22) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (23) Ketentuan khusus rawan bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (24) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (14) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.3 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (25) Ketentuan khusus sempadan, sebagaimana dimaksud pada ayat (18) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.4 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (26) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, sebagaimana dimaksud pada ayat (20) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX.5 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 42

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) huruf f merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan pemberian insentif; dan/atau
 - b. ketentuan pemberian disinsentif.

- (3) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (6) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 43

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 44

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan antara lain, melalui :
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang WP Perkotaan Sungai Manau adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Sungai Manau dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundan-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Merangin tentang RDTR WP Perkotaan Sungai Manau dapat direkomendasikan oleh FPR.

- (5) Rekomendasi FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - Rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - Lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Merangin tentang RDTR WP Perkotaan Sungai Manau dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan :
 - untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 - untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak
- pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan konfirmasi KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal, 19 Januari 2024

Pj BUPATI MERANGIN,



Diundangkan di Bangko

Pada tanggal 19 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,



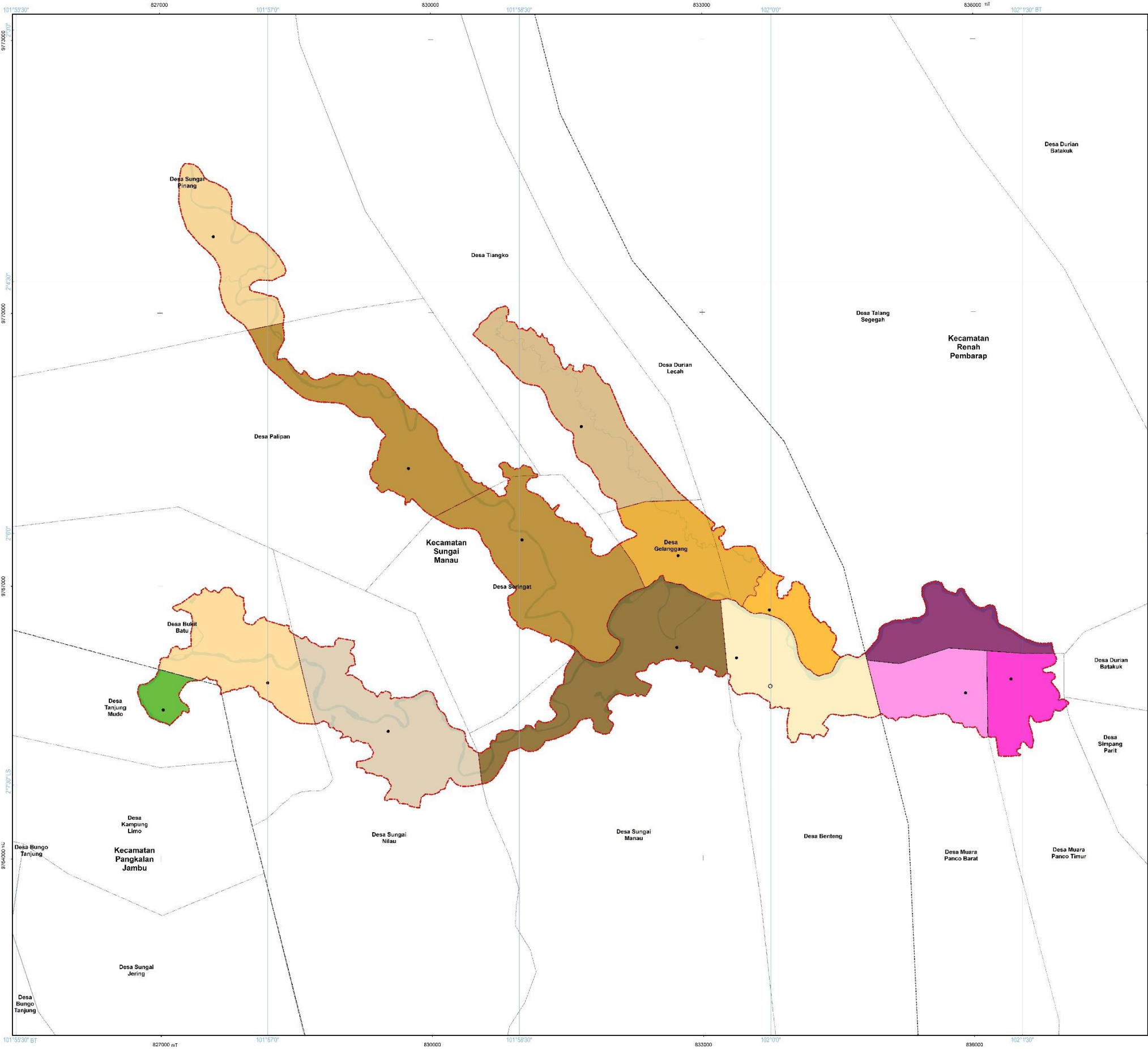
BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024, NOMOR 3

LAMPIRAN

**PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

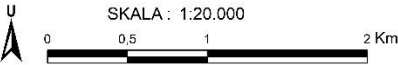
**RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 – 2044**



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA LINGKUP
WILAYAH PERENCANAAN (WP)



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas | Batas Wilayah Perencanaan | Perairan |
| o Ibukota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas WVP | Badan Air |
| • Ibukota Desa/ Kelurahan | --- Batas Desa/ Kelurahan | --- Batas SWP | |
| | | --- Batas Blok | |

LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

Kecamatan Sungai Manau

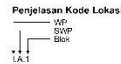
- Benteng
- Bukit Batu
- Durian Lecah
- Gelanggang
- Palipan
- Selingat
- Sungai Manau
- Sungai Nilau
- Sungai Pinang
- Tiangko

Kecamatan Renah Pembarap

- Muaro Panco Barat
- Muaro Panco Timur
- Talang Segekah

Kecamatan Pangkalan Jambu

- Tanjung Mudo



- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
 - Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BARDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
 - Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

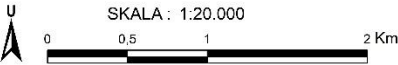
H. MUKTI



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA PEMBAGIAN
SUB WILAYAH PERENCANAAN DAN BLOK



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas | Batas Wilayah Perencanaan | Perairan |
| o Ibukota Kecamatan | - - - Batas Kecamatan | - - - Batas WVP | Badan Air |
| • Ibukota Desa/ Kelurahan | - - - Batas Desa/ Kelurahan | - - - Batas SWP | |
| | | - - - Batas Blok | |

PEMBAGIAN SWP DAN BLOK

Sub Wilayah Perencanaan A

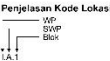
- I.A.1
- I.A.2
- I.A.3
- I.A.4
- I.A.5

Sub Wilayah Perencanaan B

- I.B.1
- I.B.2
- I.B.3

Sub Wilayah Perencanaan C

- I.C.1
- I.C.2
- I.C.3



- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
 - Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
 - Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

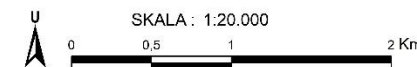
H. MUKTI



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

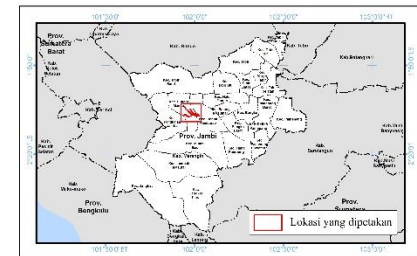
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STUKTUR RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

| Ibukota Pemerintahan | Batas | Batas Wilayah Perencanaan | Perairan |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|
| o Ibukota Kecamatan | - - - Batas Kecamatan | - - - Batas WVP | Badan Air |
| • Ibukota Desa/ Kelurahan | - - - Batas Desa/ Kelurahan | - - - Batas SWP | |
| | | - - - Batas Blok | |

RENCANA STRUKTUR RUANG

| | |
|---|---|
| Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan <ul style="list-style-type: none">Pusat Pelayanan Kota/Kawasan PerkotaanSub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan PerkotaanPusat Lingkungan Kelurahan/Desa | Rencana Jaringan Drainase <ul style="list-style-type: none">Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)Jaringan Drainase PrimerJaringan Drainase SekunderJaringan Drainase Tersier |
| Rencana Jaringan Transportasi <ul style="list-style-type: none">Jaringan Transportasi Darat<ul style="list-style-type: none">Terminal Penumpang Tipe CJembatanHalteJalan Kolektor PrimerJalan Kolektor SekunderJalan Lokal PrimerJalan Lingkungan PrimerJalan Lingkungan Sekunder | Rencana Jaringan Air Minum <ul style="list-style-type: none">Instalasi ProduksiBangunan Penangkap Mata AirJaringan Distribusi Pembagi |
| Rencana Jaringan Energi <ul style="list-style-type: none">Gardu DistribusiSaluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) | Rencana Jaringan Sumber Daya Air <ul style="list-style-type: none">BendunganBangunan Pengendalian BanjirJaringan Irigasi PrimerJaringan Irigasi Sekunder |
| Rencana Jaringan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none">Menara Base Transceiver Station (BTS)Jaringan Serat Optik | Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) <ul style="list-style-type: none">IPAL Skala Kawasan Tertentu/PermukimanSistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) |
| | Rencana Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none">Tempat Penampungan Sementara (TPS) |
| | Rencana Jaringan Prasarana Lainnya <ul style="list-style-type: none">Tempat Evakuasi AkhirTempat Evakuasi SementaraJalur Evakuasi BencanaJalur SepedaJaringan Pejalan KakiTanggul Penahan Longsor |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

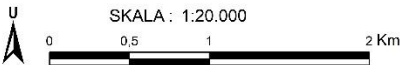
H. MUKTI



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

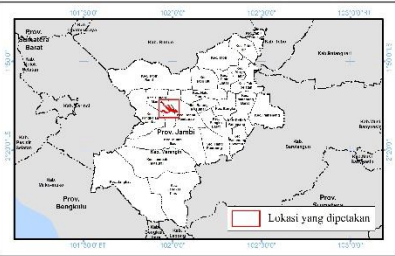
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

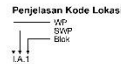


KETERANGAN :

| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Wilayah Perencanaan | Perairan |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|
| o Ibukota Kecamatan | - - - - - Batas Kecamatan | - - - - - Batas WP | Badan Air |
| • Ibukota Desa/ Kelurahan | - - - - - Batas Desa/ Kelurahan | - - - - - Batas SWP | |
| | | - - - - - Batas Blok | |

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa



- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
 - Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
 - Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

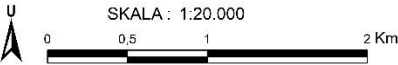
H. MUKTI



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

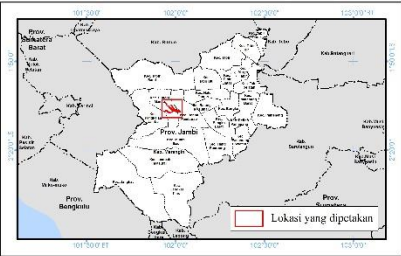
LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Wilayah Perencanaan | Peraliran |
| o Ibukota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas WVP | Badan Air |
| • Ibukota Desa/ Kelurahan | --- Batas Desa/ Kelurahan | --- Batas SWVP | |
| | | --- Batas Blok | |

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan

Jaringan Transportasi

- | | |
|--|-------------------------|
| | Terminal Penumpang Tipe |
| | Jembatan |
| | Halte |
| | Jalan Kolektor |
| | Jalan Kolektor |
| | Jalan Lokal |
| | Jalan Lingkungan |
| | Jalan Lingkungan |

Penjelasan Kode Lokasi



- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
 - Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTTRA/10/2020
 - Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

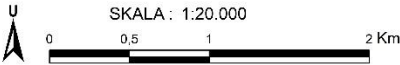
H. MUKTI



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

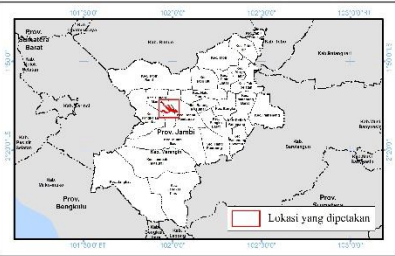
LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Wilayah Perencanaan | Perairan |
| ○ Ibukota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas WVP | Badan Air |
| ● Ibukota Desa/ Kelurahan | --- Batas Desa/ Kelurahan | --- Batas SWP | |
| | | --- Batas Blok | |

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Energi

□ Gardu Distribusi
× Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
× Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

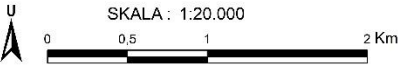
H. MUKTI



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

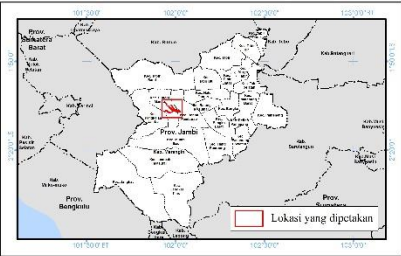
LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

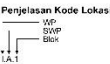


KETERANGAN :

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Wilayah Perencanaan | Perairan |
| ○ Ibukota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas WVP | Badan Air |
| ● Ibukota Desa/ Kelurahan | --- Batas Desa/ Kelurahan | --- Batas SWVP | |
| | | --- Batas Blok | |

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Telekomunikasi

- Menara Base Transceiver Station (BTS)
 Jaringan Serat Optik



- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
 - Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
 - Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

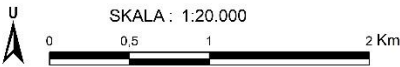
H. MUKTI



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

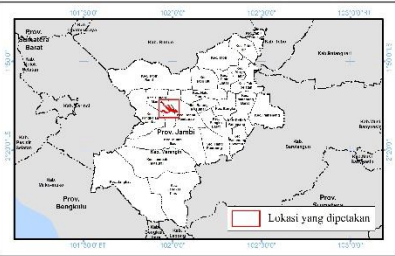
LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

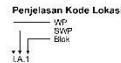


KETERANGAN :

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Wilayah Perencanaan | Perairan |
| ○ Ibukota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas WVP | Badan Air |
| ● Ibukota Desa/ Kelurahan | --- Batas Desa/ Kelurahan | --- Batas SWP | |
| | | --- Batas Blok | |

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

- Bendungan
■ Bangunan Pengendalian Banjir
--- Jaringan Irigasi Primer
--- Jaringan Irigasi Sekunder



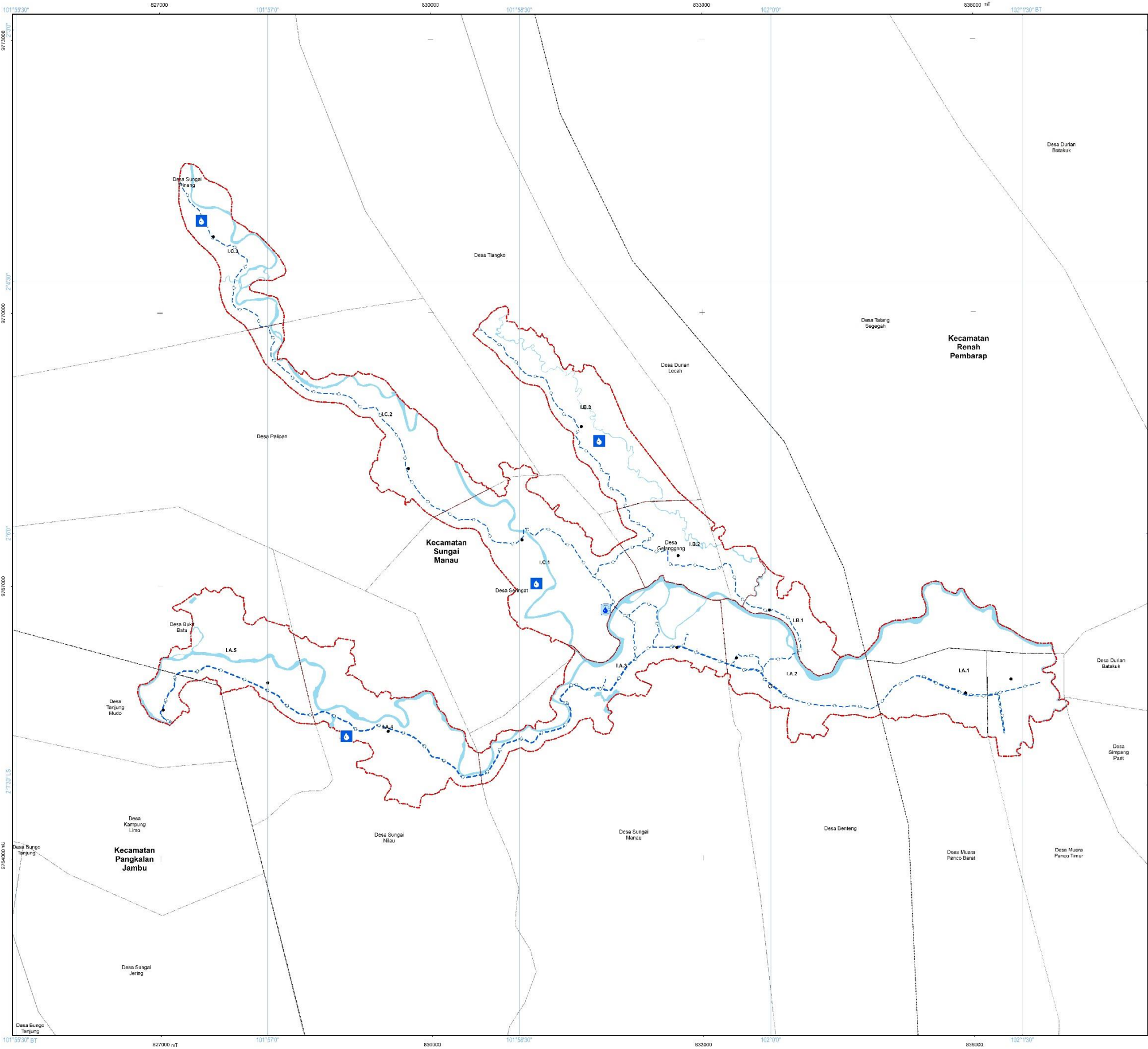
- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
 - Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTTRA/10/2020
 - Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

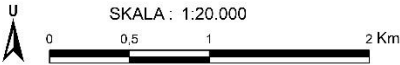
H. MUKTI



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

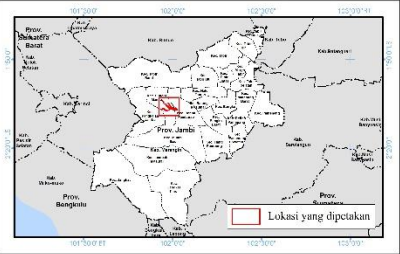
LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



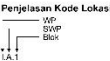
KETERANGAN :

- | | | | |
|---|---|---|------------------------------|
| Ibukota Pemerintahan ○ Ibukota Kecamatan ● Ibukota Desa/ Kelurahan | Batas Administrasi --- Batas Kecamatan --- Batas Desa/ Kelurahan | Batas Wilayah Perencanaan --- Batas WVP --- Batas SWVP --- Batas Blok | Perairan Badan Air |
|---|---|---|------------------------------|

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Air

- Instalasi Produksi
Bangunan Penangkap Mata Air
Jaringan Distribusi



- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

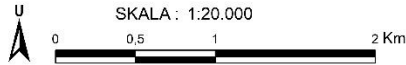
H. MUKTI



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

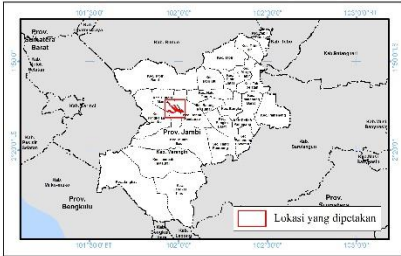
LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



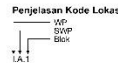
KETERANGAN :

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Wilayah Perencanaan | Perairan |
| ○ Ibukota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas WVP | Badan Air |
| ● Ibukota Desa/ Kelurahan | --- Batas Desa/ Kelurahan | --- Batas SWP | |
| | | --- Batas Blok | |

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Air

- Instalasi Produksi
- Bangunan Penangkap Mata Air
- Jaringan Distribusi Pembagi



- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
 - Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTTRA/10/2020
 - Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

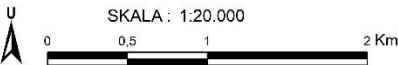
H. MUKTI



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

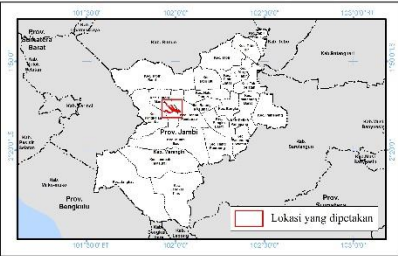
LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Wilayah Perencanaan | Perairan |
| ○ Ibukota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas WVP | Badan Air |
| ● Ibukota Desa/ Kelurahan | --- Batas Desa/ Kelurahan | --- Batas SWVP | |
| | | --- Batas Blok | |

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Persampahan

Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Penjelasan Kode Lokasi



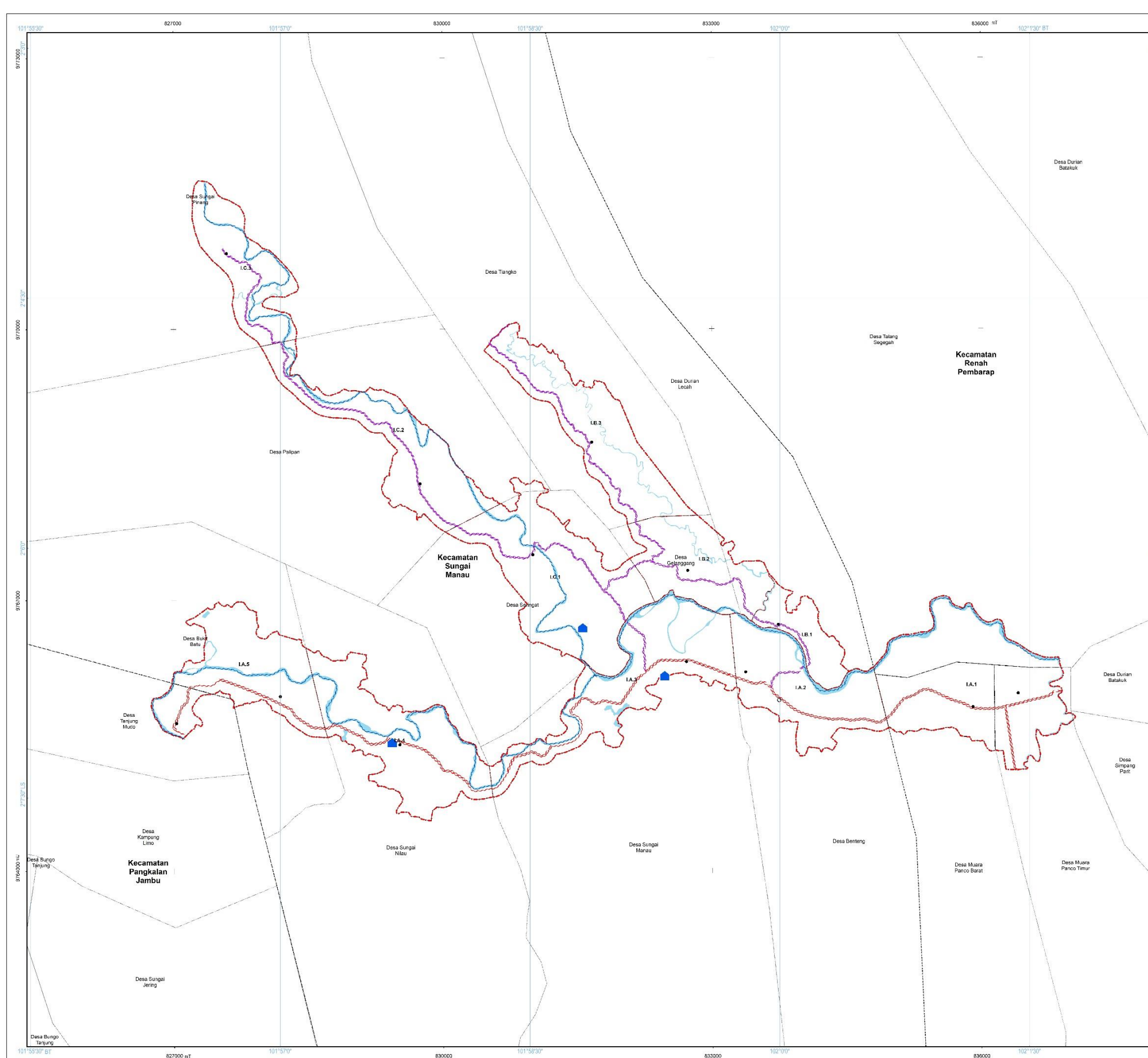
- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
 - Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTTRA/10/2020
 - Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

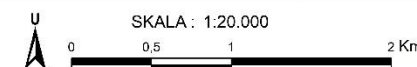
H. MUKTI



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

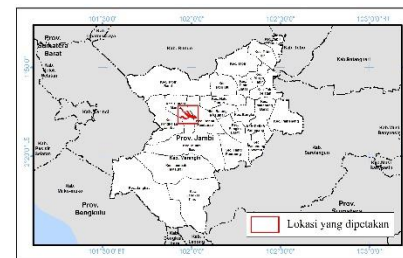
LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE**



| | |
|------------------|---|
| Proyeksi | : Universal Transverse Mercator |
| Sistem Grid | : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S |
| Datum Horizontal | : Datum WGS 1984 |
| Datum Vertikal | : Geoid EGM 2008 |

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Wilayah Perencanaan | Perairan |
|--|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Ibukota Kecamatan ● Ibukota Desa/ Kelurahan | <p>--- Batas Kecamatan</p> <p>----- Batas Desa/ Kelurahan</p> | <p>----- Batas WP</p> <p>----- Batas SWP</p> <p>----- Batas Blok</p> |  Badan Air |

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan

| | |
|---|----------------------------|
|  | Bangunan Peresapan (Kolam) |
|  | Jaringan Drainase |
|  | Jaringan Drainase |
|  | Jaringan Drainase |

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IG/PTRA/10/2020
3. Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

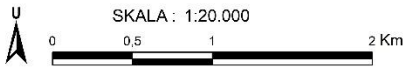
H. MUKTI



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

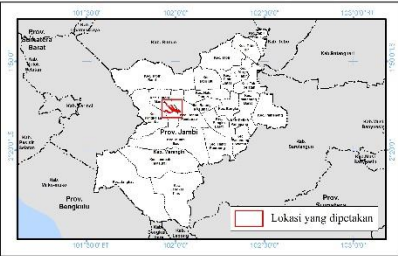
LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

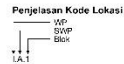


KETERANGAN :

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Wilayah Perencanaan | Perairan |
| ○ Ibukota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas WVP | Badan Air |
| ● Ibukota Desa/ Kelurahan | --- Batas Desa/ Kelurahan | --- Batas SWP | |
| | | --- Batas Blok | |

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

- Tempat Evakuasi Akhir
- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sepeda
- Jaringan Pejalan Kaki
- Tanggul Pemahan Longsor



- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
 - Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTTRA/10/2020
 - Pengolahan data tahun 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

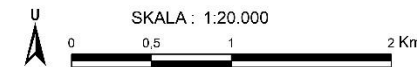
H. MUKTI



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

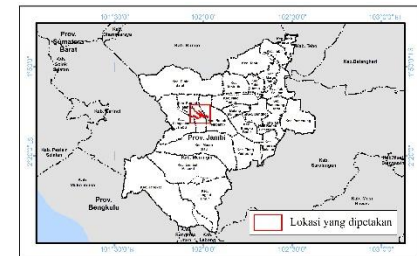
LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA POLA RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Wilayah Perencanaan |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| o Ibukota Kecamatan | - - - - - Batas Kecamatan | - - - - - Batas WP |
| • Ibukota Desa/ Kelurahan | - - - - - Batas Desa/ Kelurahan | - - - - - Batas SWP |
| | | - - - - - Batas Blok |

RENCANA POLA RUANG

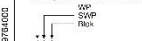
ZONA LINDUNG

| Zona Badan Air | Zona Ruang Terbuka Hijau |
|--------------------------|--------------------------|
| BA Badan Air | RTH-1 Taman Kecamatan |
| PS Perlindungan Setempat | RTH-2 Taman Kelurahan |
| | RTH-3 Pemakaman |

ZONA BUDIDAYA

| Badan Jalan | Zona Sarana Pelayanan Umum |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| BJ Badan Jalan | SPU-1 SPU Skala Kota |
| Zona Hutan Produksi | SPU-2 SPU Skala Kecamatan |
| HP Hutan Produksi Terbatas | SPU-3 SPU Skala Kelurahan |
| Zona Pertanian | SPU-4 SPU Skala RW |
| P-1 Tanaman Pangan | Zona Perdagangan dan Jasa |
| P-2 Perkebunan | K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota |
| Zona Kawasan Peruntukan Industri | K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP |
| WI Kawasan Peruntukan Industri | Zona Perkantoran |
| Zona Pariwisata | KT Perkantoran |
| W Pariwisata | Zona Peruntukan Lainnya |
| Zona Perumahan | PL-3 Instalasi Pengolahan Air Minum |
| R-3 Perumahan Kepadatan Sedang | Zona Pertahanan dan Keamanan |
| R-4 Perumahan Kepadatan Rendah | PK Pertahanan dan Keamanan |

Penjelasan Kode Lokasi



- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plades perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
 - Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/GT/PT/TRA/10/2020
 - SK 6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 Provinsi Jambi
 - Pengolahan data tahun 2020 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

H. MUKTI

Lampiran XV Ketentuan Pemanfaatan Ruang

| NO | PROGRAM UTAMA | LOKASI | WAKTU PELAKSANAAN | | | | | SUMBER DANA | INSTANSI PELAKSANA |
|-----|--|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| | | | TAHAP I | TAHAP II | TAHAP III | TAHAP IV | TAHAP V | | |
| | | | 2024 | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2044 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | PROGRAM PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG | | | | | | | | |
| A | Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan | | | | | | | | |
| A.1 | Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) atau Panduan rancang kota pada pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan | SWP A Blok I.A.3 | | | | | | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | BAPPEDA Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta |
| 2 | Peningkatan percepatan fungsi kawasan pada pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan | SWP A Blok I.A.3 | | | | | | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | BAPPEDA Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta |
| 3 | Pembangunan sarana dan prasarana kawasan pada pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan | SWP A Blok I.A.3 | | | | | | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | BAPPEDA Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta |
| A.2 | Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) atau Panduan rancang kota pada sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan | SWP A Blok I.A.2 | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | BAPPEDA Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta |
| 2 | Peningkatan percepatan fungsi kawasan pada sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan | SWP A Blok I.A.2 | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | BAPPEDA Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta |
| 3 | Pengembangan sarana dan prasarana kawasan pada sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan | SWP A Blok I.A.2 | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | BAPPEDA Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta |
| A.3 | Pusat Pelayanan Lingkungan | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) atau Panduan rancang kota pada pusat lingkungan kelurahan/desa | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3. | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | BAPPEDA Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta |
| 2 | Peningkatan percepatan fungsi kawasan pada pusat lingkungan kelurahan/desa | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3. | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | BAPPEDA Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta |
| 3 | Pengembangan sarana dan prasarana Kawasan pada pusat lingkungan kelurahan/desa | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3. | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | BAPPEDA Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta |
| B | Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi | | | | | | | | |
| B.1 | Jalan Kolektor Primer | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer berupa jalan Bts. Kota Bangko - Sei Manau | SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 | | | | | | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten,Swasta |
| 2 | Peningkatan dan pemeliharaanJalan Kolektor Primer berupa jalan Sei Manau - Bts Kab. Merangin/Kab. Kerinci | SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5 | | | | | | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten,Swasta |
| | | | | | | | | | |
| B.2 | Jalan Kolektor Sekunder | | | | | | | | |
| 1 | Pemeliharaan jalan kolektor sekunder berupa jalan Sungai Manau - Sungai Pinang | SWP A Blok I.A.3; SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3. | | | | | | APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten,Swasta |
| | | | | | | | | | |
| B.3 | Jalan Lokal Primer | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer berupa jalan Simpang Tiangko – Tiangko | SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 | | | | | | APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta |
| 2 | Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer berupa jalan Simpang Muaro Panco - Simpang Renah Medan | SWP A Blok I.A.1 | | | | | | APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta |
| 3 | Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer berupa jalan Muaro Panco - Talang Segegah | SWP A Blok I.A.1 | | | | | | APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta |
| 4 | Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer berupa jalan Alternatif Pasar Sungai Manau | SWP A Blok I.A.2 | | | | | | APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta |
| 5 | Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer berupa jalan Simpang Gelanggang – Durian Lecah | SWP A Blok I.A.2: SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; SWP C Blok I.C.1. | | | | | | APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta |
| 6 | Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer berupa jalan Pesantren Durian Hijau | SWP A Blok I.A.1 | | | | | | APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|
| 7 | Peningkatan dan pemeliharaan jalan pendukung Objek Wisata Geopark berupa Jalan Simpang Tiangko - Tiangko | SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan SWP C Blok I.C.1 | | | | | | APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta |
| 8 | Penyusunan Perencanaan Teknis Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS) rencana pembangunan jalan lingkarpasar sungai manau | SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 | | | | | | APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta |
| 9 | Penyusunan Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) rencana pembangunan jalan lingkarpasar sungai manau | SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 | | | | | | APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta |
| 10 | Pengadaan Tanah rencana pembangunan jalan jalan lingkarpasar sungai manau | SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 | | | | | | APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta |
| 11 | Pembangunan jalan lingkarpasar sungai manau | SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 | | | | | | APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta |
| | | | | | | | | | |
| B.4 Jalan Lingkungan Primer | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan Jalan Lingkungan Primer | a. Jalan Desa Benteng ke Desa Muaro Panco Barat berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2; b. Jalan Desa Benteng ke Durian Lecah berada di SWP B Blok I.B.1; c. Jalan Desa Bukit Batu ke Desa Palipan berada di SWP A Blok I.A.5, SWP C Blok I.C.2; d. Jalan Desa Gelanggang ke Desa Tiangko berada di SWP Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; e. Jalan Desa Seringat berada di SWP C Blok I.C.1; f. Jalan Desa Sungai Manau ke Desa Gelanggang berada di SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.2; g. Jalan Desa Tanjung Mudo berada di SWP A Blok I.A.5; h. Jalan Lingkarpasar Sungai Manau berada di SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3. | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta |
| 2 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer | a. Jalan Desa Benteng ke Desa Muaro Panco Barat berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2; b. Jalan Desa Benteng ke Durian Lecah berada di SWP B Blok I.B.1; c. Jalan Desa Bukit Batu ke Desa Palipan berada di SWP A Blok I.A.5, SWP C Blok I.C.2; d. Jalan Desa Gelanggang ke Desa Tiangko berada di SWP Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; e. Jalan Desa Seringat berada di SWP C Blok I.C.1; f. Jalan Desa Sungai Manau ke Desa Gelanggang berada di SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.2; g. Jalan Desa Tanjung Mudo berada di SWP A Blok I.A.5; h. Jalan Lingkarpasar Sungai Manau berada di SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3. | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta |
| | | | | | | | | | |
| B.5 Jalan Lingkungan Sekunder | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan Jalan Lingkungan Sekunder | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3. | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta |
| 2 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Sekunder | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3. | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta |
| | | | | | | | | | |
| B.6 Terminal Penumpang Tipe C | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Perencanaan Teknis Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS) Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | SWP A Blok I.A.3 | | | | | | APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta |
| 2 | Penyusunan Perencanaan Teknis Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | SWP A Blok I.A.3 | | | | | | APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta |
| 3 | Pengadaan Tanah Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | SWP A Blok I.A.3 | | | | | | APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta |
| 4 | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | SWP A Blok I.A.3 | | | | | | APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta |
| 5 | Peningkatan sarana dan prasarana pendukung Terminal Penumpang Tipe C | SWP A Blok I.A.3 | | | | | | APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|
| B.7 | Jembatan | | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Jembatan | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3. | | | | | | APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta | |
| 2 | Pemeliharaan Jembatan | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3. | | | | | | APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta | |
| | | | | | | | | | | |
| B.8 | Halte | | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Halte | SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.5 | | | | | | APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta | |
| 2 | Pemeliharaan Halte | SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.5 | | | | | | APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta | |
| | | | | | | | | | | |
| C | Perwujudan Rencana Jaringan Energi | | | | | | | | | |
| C.1 | Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) | SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5 | | | | | | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | PT. PLN, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | |
| 2 | Peningkatan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) | SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5 | | | | | | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | PT. PLN, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | |
| | | | | | | | | | | |
| C.2 | Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3. | | | | | | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | PT. PLN, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | |
| 2 | Peningkatan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3. | | | | | | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | PT. PLN, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | |
| | | | | | | | | | | |
| C.3 | Gardu Distribusi | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan dan pemeliharaan Gardu distribusi | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3. | | | | | | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | PT. PLN, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | |
| | | | | | | | | | | |
| D | Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi | | | | | | | | | |
| D.1 | Jaringan Serat Optik | | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Jaringan Bergerak Teristerial berupa Jaringan Serat Optik | SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5 | | | | | | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | PT. Telkom, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | |
| | | | | | | | | | | |
| D.2 | Menara Base Transceiver Station (BTS) | | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Jaringan bergerak seluler berupa Menara Base Transceiver Station (BTS) secara terpadu berdasarkan Master Plan Telekomunikasi | SWP A, SWP B dan SWP C | | | | | | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | PT. Telkom, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | |
| 2 | Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Bergerak Seluler berupa Menara Base Transceiver Station (BTS) terpadu | a. SWP A Blok I.A.2, I.A.3, Blok I.A.5. SWP B Blok I.B.3; b. SWP C Blok I.C.2. | | | | | | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | PT. Telkom, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | |
| | | | | | | | | | | |
| E | Perwujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air | | | | | | | | | |
| E.1 | Sistem Jaringan Irigasi | | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan saluran Jaringan Irigasi Primer | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2. | | | | | | APBD Kabupaten | Dinas PUPR Kabupaten | |
| 2 | Peningkatan kinerja dan pemeliharaan saluran Jaringan Irigasi Primer | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2. | | | | | | APBD Kabupaten | Dinas PUPR Kabupaten | |
| 3 | Pembangunan saluran Jaringan Irigasi Sekunder | a. SWP A Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.2; c. SWP C Blok I.C.2. | | | | | | APBD Kabupaten | Dinas PUPR Kabupaten | |
| 4 | Peningkatan kinerja dan pemeliharaan saluran Jaringan Irigasi Sekunder | a. SWP A Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.2; c. SWP C Blok I.C.2. | | | | | | APBD Kabupaten | Dinas PUPR Kabupaten | |

[illegible]

| H | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| Pewujudan Rencana Jaringan Persampahan | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan Komunitas Peduli lingkungan | SWP A Blok I.A.1 | | | | | | APBD Kabupaten | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten | |
| 2 | Perencanaan Masterplan Persampahan | SWP A, SWP B, SWP C | | | | | | APBD Kabupaten | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten | |
| H.1 Stasiun Peralihan Antara (SPA) | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Kajian Perencanaan Teknis Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS)Pembangunan tempat penampungan sampah berupa stasiun peralihan antara (SPA) | SWP A, SWP B, SWP C | | | | | | APBD Kabupaten | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten | |
| H.2 Tempat Penampungan Sementara (TPS) | | | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan tempat penampungan sampah berupa kontainer sampah | SWP A, SWP B, SWP C | | | | | | APBD Kabupaten | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten | |
| 2 | Pembangunan tempat penampungan sampah berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok 4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3. | | | | | | APBD Kabupaten | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten | |
| 3 | Pemeliharaaa tempat penampungan sampah berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok 4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3. | | | | | | APBD Kabupaten | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten | |
| I Perwujudan Rencana Jaringan Drainase | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Masterplan drainase | SWP A, SWP B, SWP C | | | | | | APBD Kabupaten | Dinas PUPR Kabupaten | |
| I.1 Jaringan Drainase | | | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan dan Pengembangan jaringan drainase primer | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.2; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3. | | | | | | APBD Kabupaten | Dinas PUPR Kabupaten | |
| 2 | Pembangunan dan Pengembangan jaringan drainase sekunder | SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 Blok I.A.5 | | | | | | APBD Kabupaten | Dinas PUPR Kabupaten | |
| 3 | Pembangunan dan Pengembangan jaringan drainase tersier | a. SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3. | | | | | | APBD Kabupaten | Dinas PUPR Kabupaten | |
| I.2 Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) | | | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Bangunan peresapan (Kolam Retensi) | a. SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4; b. SWP C Blok I.C.1. | | | | | | APBD Kabupaten | Dinas PUPR Kabupaten | |
| J Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya | | | | | | | | | | |
| J.1 Jalur Evakuasi Bencana | | | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan rambu evakuasi bencana dari kawasan rawan bencana ke Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3. | | | | | | APBD Kabupaten | BPBD Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten | |
| J.2 Tempat Evakuasi | | | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan kelengkapan sarana prasarana pendukung Tempat Evakuasi Akhir (TEA) | SWP A Blok I.A.3 | | | | | | APBD Kabupaten | BPBD Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten | |
| 2 | Pembangunan kelengkapan sarana prasarana pendukung Tempat Evakuasi Sementara (TES) | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3. | | | | | | APBD Kabupaten | BPBD Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten | |
| J.3 Jalur Sepeda | | | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan rencana pembuatan/mengecatan jalur sepeda di sisi jalan | a. SWP A Blok I.A.3; b. SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1. | | | | | | APBD Kabupaten | BAPPEDA Kabupaten, Disarpora Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten | |
| J.4 Jaringan Pejalan Kaki | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengadaan Tanah Rencana Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki kawasan Geopark | SWP B Blok I.B.3. | | | | | | Unesco, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | BAPPEDA Kabupaten, Disarpora Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | |
| 2 | Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki kawasan Geopark | SWP B Blok I.B.3. | | | | | | Unesco, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | BAPPEDA Kabupaten, Disarpora Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|
| J.5 | Tanggul Penahan Longsor | | | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan tanggul penahan longsor | a. SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1; c. SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3. | | | | | | APBD Kabupaten | BPBD Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten | | |
| | | | | | | | | | | | |
| II | PERWUJUDAN POLA RUANG | | | | | | | | | | |
| II.A | Perwujudan Zona Lindung | | | | | | | | | | |
| A | Perwujudan Zona Badan Air | | | | | | | | | | |
| 1 | Penataan Zona Badan Air | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3. | | | | | | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Balai Wilayah Sungai/TKPSDA Batanghari, Dinas PUPR Kabupaten | | |
| | | | | | | | | | | | |
| B | Perwujudan Zona Perlindungan Setempat | | | | | | | | | | |
| 1 | Perencanaan Penataan kawasan sekitar Zona Perlindungan Setempat berupa sempadan sungai | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3. | | | | | | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Balai Wilayah Sungai/TKPSDA Batanghari, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten | | |
| 2 | Pengembangan ruang terbuka hijau di Zona Perlindungan Setempat | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3. | | | | | | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten | Balai Wilayah Sungai/TKPSDA Batanghari, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten | | |
| C | Perwujudan Zona Ruang terbuka Hijau | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan ruang terbuka hijau pada Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan | SWP A Blok I.A.3 | | | | | | APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | | |
| 2 | Pengembangan ruang terbuka hijau pada sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan | SWP A Blok I.A.2 | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | | |
| 3 | Pengadaan Ruang Terbuka Hijau sebesar 9,08% dari Pemenuhan RTH publik hingga minimal 20% pada luasan WP Perkotaan Sungai Manau dengan rincian : | SWP A, SWP B, SWP C | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | | |
| a | Pengembang RTH Publik pada zona budidaya sebesar 3% | SWP A, SWP B, SWP C | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | | |
| b | Pengembang RTH Publik pada zona budidaya sebesar 3% | SWP A, SWP B, SWP C | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | | |
| c | Pengembang RTH Publik pada zona budidaya sebesar 3,08% | SWP A, SWP B, SWP C | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | | |
| 4 | Penyediaan RTH Privat minimal 10% dari wilayah perencanaan | SWP A, SWP B, SWP C | | | | | | Masyarakat, Swasta | Masyarakat, Swasta | | |
| 5 | Penataan Koridor Jalan menuju objek wisata berupa penataan pedestrian | SWP B Blok I.B.3 | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | | |
| C.1 | Sub-zona Taman Kecamatan | | | | | | | | | | |
| 1 | Penataan Sub-zona Taman Kecamatan | SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | | |
| 2 | Pembangunan dan Pembebasan lahan Sub-zona Taman Kecamatan | SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | | |
| C.2 | Sub-zona Taman Kelurahan | | | | | | | | | | |
| 1 | Penataan Sub-zona Taman Kelurahan | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3. | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | | |
| 2 | Pembangunan dan Pembebasan lahan Sub-zona Taman Kelurahan | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3. | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | | |
| C.3 | Sub-zona Pemakaman | | | | | | | | | | |
| 1 | Penataan Sub-zona Pemakaman | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2. | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | | |
| 2 | Pengembangan Sub-zona Pemakaman | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2. | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|
| II.B Perwujudan Zona Budi Daya | | | | | | | | | | |
| A Perwujudan Zona Badan Jalan | | | | | | | | | | |
| 1 | Penataan Zona Badan Jalan | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3. | | | | | | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Kementrian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | |
| | | | | | | | | | | |
| B Perwujudan Zona Hutan Produksi | | | | | | | | | | |
| 1 | Pemeliharaan Sub-Zona Hutan Produksi Tetap | SWP A Blok I.A.1 | | | | | | APBN, APBD Kabupaten, Swasta | KLHK, Swasta | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| C | Perwujudan Zona Pertanian | | | | | | | | | |
| C.1 | Sub-Zona Tanaman Pangan | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan Sub-Zona Tanaman Pangan berupa lahan pertanian pangan berkelanjutan | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2. | | | | | | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten, Swasta | |
| | | | | | | | | | | |
| C.2 | Sub-Zona Perkebunan | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan Sub-Zona Perkebunan | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 . | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Perkebunan dan Perikanan Kabupaten, Swasta | |
| | | | | | | | | | | |
| D | Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan pusat industri kecil dan menengah | SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Koperindag Kabupaten, Swasta | |
| 2 | Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah | SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Koperindag Kabupaten, Swasta | |
| 3 | Pengembangan Zona Kawasan Peruntukan Industri | SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Koperindag Kabupaten, Swasta | |
| | | | | | | | | | | |
| E | Perwujudan Zona Pariwisata | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Pedoman pengembangan Zona Pariwisata | SWP B Blok I.B.3 | | | | | | UNESCO, APBN, APBD Kabupaten, Swasta | BAPPEDA Kabupaten, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | |
| 2 | Penyusunan DED Zona Pariwisata minat khusus | SWP B Blok I.B.3 | | | | | | UNESCO, APBN, APBD Kabupaten, Swasta | BAPPEDA Kabupaten, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | |
| 3 | Pembangunan Penataan Zona Pariwisata Geopark Merangin | SWP B Blok I.B.3 | | | | | | UNESCO, APBN, APBD Kabupaten, Swasta | BAPPEDA Kabupaten, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | |
| 4 | Pengembangan Zona Pariwisata | SWP B Blok I.B.3 | | | | | | UNESCO, APBN, APBD Kabupaten, Swasta | BAPPEDA Kabupaten, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | |
| | | | | | | | | | | |
| F | Perwujudan Zona Perumahan | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan kawasan permukiman Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan | SWP A Blok I.A.3 | | | | | | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten, Swasta | |
| 2 | Pengembangan kawasan permukiman sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan | SWP A Blok I.A.2 | | | | | | APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten, Swasta | |
| 3 | Pengembangan kawasan permukiman Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3. | | | | | | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Kabupaten, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten, Swasta | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|
| F.1 | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3. | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | |
| 2 | Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3. | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | |
| | | | | | | | | | | |
| F.2 | Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah | a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3. | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | |
| 2 | Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah | a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3. | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | |
| | | | | | | | | | BAPPEDA Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | |
| G | Perwujudan Sarana Pelayanan Umum | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan sarana pelayanan umum skala sub regional pada Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan | SWP A Blok I.A.3 | | | | | | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Provinsi, BAPPEDA Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten,Swasta | |
| 2 | Pengembangan dan peningkatan kegiatan kesehatan skala sub regional pada Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan | SWP A Blok I.A.3 | | | | | | APBD Kabupaten Swasta | BAPPEDA Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten,Swasta | |
| 3 | Pengembangan kegiatan pendidikan | SWP A Blok I.A.3 | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas kesehatan Kabupaten, Kantor Departemen Agama, Dinas PUPR Kabupaten, Masyarakat, Swasta | |
| G.1 | Sub-Zona SPU Skala Kota | | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Sub-Zona SPU Skala Kota | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan b. SWP B Blok I.B.1. | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas kesehatan Kabupaten, Kantor Departemen Agama Dinas PUPR Kabupaten, Masyarakat, Swasta | |
| 2 | Pemeliharaan Fasilitas Sub-Zona SPU Skala Kota | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan b. SWP B Blok I.B.1. | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas kesehatan Kabupaten, Kantor Departemen Agama Dinas PUPR Kabupaten, Masyarakat, Swasta | |
| | | | | | | | | | | |
| G.2 | Sub-Zona SPU Skala Kecamatan | | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan | SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas kesehatan Kabupaten, Kantor Departemen Agama Dinas PUPR Kabupaten, Masyarakat, Swasta | |
| 2 | Pemeliharaan Fasilitas Sub-Zona SPU Skala Kecamatan | SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas kesehatan Kabupaten, Kantor Departemen Agama Dinas PUPR Kabupaten, Masyarakat, Swasta | |
| | | | | | | | | | | |
| G.3 | Sub-Zona SPU Skala Kelurahan | | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3. | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas kesehatan Kabupaten, Kantor Departemen Agama Dinas PUPR Kabupaten, Masyarakat, Swasta | |
| 2 | Pemeliharaan Fasilitas Sub-Zona SPU Skala Kelurahan | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3. | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas kesehatan Kabupaten, Kantor Departemen Agama Dinas PUPR Kabupaten, Masyarakat, Swasta | |
| | | | | | | | | | | |
| G.4 | Sub-Zona SPU Skala RW | | | | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Sub-Zona SPU Skala RW | SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3. | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas kesehatan Kabupaten, Kantor Departemen Agama Dinas PUPR Kabupaten, Masyarakat, Swasta | |
| 2 | Pemeliharaan Fasilitas Sub-Zona SPU Skala RW | SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.5; SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3. | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas kesehatan Kabupaten, Kantor Departemen Agama Dinas PUPR Kabupaten, Masyarakat, Swasta | |
| | | | | | | | | | | |

| H | Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|--|--|------------------------|---|--|
| H.1 | Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Pedoman Pengembangan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota | SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5 | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | |
| 2 | Pembangunan Fasilitas Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota | SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5 | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | |
| 3 | Pengembangan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota | SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5 | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | |
| 4 | Pengembangan Pasar Sungai Manau | SWP A Blok I.A.3 | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | |
| | | | | | | | | | | |
| H.2 | Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP | | | | | | | | | |
| 1 | Penyusunan Pedoman Pengembangan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP | SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3. | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | |
| 2 | Pembangunan Fasilitas Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP | SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3. | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | |
| 3 | Pengembangan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP | SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3. | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, Swasta | |
| | | | | | | | | | | |
| I | Perwujudan Zona Perkantoran | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan kawasan perkantoran skala sub regional | SWP A Blok I.A.2 | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Kabupaten | |
| 2 | Penataan Kawasan/ Bangunan Zona Perkantoran | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3. | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Kabupaten | |
| 3 | Pengembangan Zona Perkantoran | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3. | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Kabupaten | |
| 4 | Pengembangan dan Pemeliharaan Zona Perkantoran | a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4 dan Blok I.A.5; b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3. | | | | | | APBD Kabupaten, Swasta | Dinas PUPR Kabupaten | |
| | | | | | | | | | | |
| J | Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Rutin Zona Pertahanan dan Keamanan | SWP A Blok I.A.2 | | | | | | APBN, APBD Kabupaten | TNI/POLRI dan Dinas PUPR Kabupaten | |
| 2 | Penataan Zona Pertahanan dan Keamanan | SWP A Blok I.A.2 | | | | | | APBN, APBD Kabupaten | TNI/POLRI dan Dinas PUPR Kabupaten | |
| | | | | | | | | | | |
| K | Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) | SWP C Blok I.C.1 | | | | | | APBN, APBD Kabupaten | PDAM, Dinas PUPR Kabupaten | |

MATRIK ITBX

| NO | Kategori | Kode 3 Digit | Kode 4 Digit | Kode 5 Digit | KEGIATAN | ZONA BUDIDAYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|--------------|--------------|--------------|---|----------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------------------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | | | | | ZONA BADAN AIR | ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT | ZONA RUANG TERBUKA HIJAU | | | ZONA BADAN JALAN | ZONA HUTAN PRODUKSI | ZONA PERTANIAN | | ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI | ZONA PARIWISATA | ZONA PERUMAHAN | | | | ZONA SARANA PELAYANAN UMUM | | | | ZONA PERDAGANGAN DAN JASA | | ZONA PEKANTORAN | ZONA PERKUTUKAN LAINNYA | ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN |
| | | | | | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukaman | Badan Jalan | Hutan Produksi Terbatas | Tanaman Pangan | Perkebunan | Kawasan Perindustrian | Wisata | Rumah Kepadatan Sedang | Rumah Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perkantoran | IPAM | Pertahanan dan Keamanan | | |
| | | | | | BA | PS | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | BJ | HPT | P-1 | P-3 | KPI | W | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | KT | PL-3 | HK | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 011 PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | A | 011 | 0112 | 01121 | Pertanian Padi Hibrida | X | B5 | X | X | X | X | X | I | I | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | | |
| 2 | A | 011 | 0112 | 01122 | Pertanian Padi Inbrida | X | B5 | X | X | X | X | X | I | I | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | | |
| 3 | A | 011 | 0113 | 01131 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | X | B5 | X | X | X | X | X | I | I | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | | |
| 4 | A | 011 | 0113 | 01132 | Pertanian Hortikultura Buah | X | B5 | X | X | X | X | X | I | I | x | X | X | T2, T3 | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | | |
| 5 | A | 011 | 0113 | 01133 | Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | X | B5 | X | X | X | X | X | I | I | x | X | X | T2, T3 | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | | |
| 6 | A | 011 | 0113 | 01134 | Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | X | B5 | X | X | X | X | X | I | I | x | X | X | T2, T3 | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | | |
| 7 | A | 011 | 0113 | 01135 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | X | B5 | X | X | X | X | X | I | I | x | X | X | T2, T3 | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | | |
| 8 | A | 011 | 0113 | 01139 | Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya | X | B5 | X | X | X | X | X | I | I | x | X | X | T2, T3 | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | | |
| 9 | A | 011 | 0119 | 01191 | Pertanian Tanaman Pakan Ternak | X | B5 | X | X | X | X | X | I | I | x | X | X | T2, T3 | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | | |
| 10 | A | 011 | 0119 | 01192 | Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) | X | B5 | X | X | X | X | X | I | I | x | X | X | T2, T3 | X | X | X | X | X | X | X | X | T1 | | |
| | | | | | 012 PERTANIAN TANAMAN TAHUNAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | A | 012 | 0122 | 01220 | Pertanian Buah-buahan Tropis Dan Subtropis (alpukat,pisang, pepaya,jambu air, nanas, salak, dan sejenisnya) | X | I | X | X | X | X | X | I | I | x | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | X | X | T1 | | |
| 12 | A | 012 | 0122 | 01259 | Pertanian Buah Semak Lainnya | X | I | X | X | X | X | X | I | I | x | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | X | X | T1 | | |
| 13 | A | 012 | 0126 | 01261 | Perkebunan Buah Kelapa | X | I | X | X | X | X | X | I | I | x | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | X | X | T1 | | |
| 14 | A | 012 | 0126 | 01262 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | X | X | X | X | X | X | X | I | I | x | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | X | X | T1 | | |
| 15 | A | 012 | 0127 | 01270 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman (kopi arabika, kopi robusta, kakao) | X | X | X | X | X | X | X | I | I | x | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | X | X | T1 | | |
| 16 | A | 012 | 0128 | 01281 | Perkebunan Lada | X | X | X | X | X | X | X | I | I | x | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | X | X | T1 | | |
| 17 | A | 012 | 0128 | 01282 | Perkebunan Cengkeh | X | X | X | X | X | X | X | I | I | x | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | X | X | T1 | | |
| 18 | A | 012 | 0128 | 01284 | Perkebunan Tanaman Aromatik/penyegar (vanili, nilam) | X | X | X | X | X | X | X | I | I | x | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | X | X | T1 | | |
| 19 | A | 012 | 0128 | 01289 | Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | X | X | X | X | X | X | X | I | I | x | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | X | X | T1 | | |
| 20 | A | 012 | 0129 | 01291 | Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya | X | X | X | X | X | X | X | I | I | x | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | X | X | T1 | | |
| | | | | | 013 PERTANIAN TANAMAN HIAS DAN PENGEMBANG BIAKAN TANAMAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | A | 013 | 0130 | 01302 | Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | X | X | X | X | X | X | X | I | I | x | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | X | X | T1 | | |
| | | | | | 014 PETERNAKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | A | 014 | 0141 | 01411 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | X | X | T1 | | |
| 23 | A | 014 | 0141 | 01412 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | X | X | T1 | | |
| 24 | A | 014 | 0141 | 01413 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | X | X | T1 | | |
| 25 | A | 014 | 0141 | 01414 | Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | X | X | T1 | | |
| 26 | A | 014 | 0144 | 01441 | Pembibitan Dan Budidaya Domba | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | X | X | T1 | | |
| 27 | A | 014 | 0144 | 01442 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | X | X | T1 | | |
| 28 | A | 014 | 0144 | 01443 | Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | X | X | T1 | | |
| 29 | A | 014 | 0146 | 01461 | Budidaya Ayam Ras Pedaging | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | X | X | T1 | | |
| 30 | A | 014 | 0146 | 01462 | Budidaya Ayam Ras Petelur | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | X | X | T1 | | |
| 31 | A | 014 | 0146 | 01463 | Pembibitan Dan Budidaya Ayam Buras | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | X | X | T1 | | |
| 32 | A | 014 | 0146 | 01464 | Pembibitan Dan Budidaya Itik Dan Itik Manila | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | X | X | T1 | | |
| 33 | A | 014 | 0146 | 01468 | Pembibitan Ayam Ras | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | X | X | T1 | | |
| 34 | A | 014 | 0146 | 01469 | Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | X | X | T1 | | |
| 35 | A | 014 | 0149 | 01493 | Pembibitan Dan Budidaya Lebah | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | X | X | T1 | | |
| 36 | A | 014 | 0149 | 01499 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | T2 | T2 | X | X | T1 | | |
| | | | | | KEHUTANAN DAN PEMANENAN KAYU DAN HASIL HUTAN SELAIN KAYU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 021 PENGUSAHAAN HUTAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | A | 021 | 0211 | 02111 | Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi | X | X | X | X | X | X | T2 | | I | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | A | 021 | 0211 | 02112 | Pengusahaan Hutan Pinus | X | X | X | X | X | X | T2 | I | I | x | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | X | X | T1 | | |
| 39 | A | 021 | 0211 | 02113 | Pengusahaan Hutan Mahoni | X | X | X | X | X | X | T2 | I | I | x | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | X | X | T1 | | |
| 40 | A | 021 | 0211 | 02115 | Pengusahaan Hutan Sengon/albasia/jeunjing | X | X | X | X | X | X | T2 | I | I | x | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | X | X | T1 | | |
| 41 | A | 021 | 0211 | 02117 | Pengusahaan Hutan Alkasia | X | X | X | X | X | X | T2 | I | I | x | X | X | X | X | X | X | X | T1 | T1 | X | X | T1 | | |
| 42 | A | 021 | 0211 | 02119 | Pengusahaan Hutan Lainnya | X | X | X | X | X | X | T2 | I | I | x | X | X | | | | | | | | | | | | |

| NO | Kategori | Kode 3 Digit | Kode 4 Digit | Kode 5 Digit | KEGIATAN | ZONA BUDIDAYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--------------|--------------|--------------|--|----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------------------------|----------------|------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | | | | | ZONA BADAN AIR | ZONA PERLINDUNG AN SETEMPAT | ZONA RUANG TERBUKA HIJAU | | | ZONA BADAN JALAN | ZONA HUTAN PRODUKSI | ZONA PERTANIAN | | ZONA KAWASAN PERUNTUKA N INDUSTRI | ZONA PARIWISATA | ZONA PERUMAHAN | | | | ZONA SARANA PELAYANAN UMUM | | | | ZONA PERDAGANGAN DAN JASA | | ZONA PEKANTORAN | ZONA PERUNTUKAN LAINNYA | ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN |
| | | | | | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukaman | Badan Jalan | Hutan Produksi Terbatas | Tanaman Pangan | Perkebunan | Kawasan Peruntukan Industri | Wisata | Rumah Kepadatan Sedang | Rumah Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perkantoran | IPAM | Pertahanan dan Keamanan | | |
| | | | | | | BA | PS | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | BJ | HPT | P-1 | P-3 | KPI | W | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | KT | PL-3 | HK | | |
| 284 | G | 462 | 4620 | 46202 | Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 285 | G | 462 | 4620 | 46203 | Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 286 | G | 462 | 4620 | 46205 | Perdagangan Besar Binatang Hidup | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 287 | G | 462 | 4620 | 46206 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 288 | G | 462 | 4620 | 46207 | Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 289 | G | 462 | 4620 | 46208 | Perdagangan Besar Kulit Dan Kulit Jangat | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 290 | G | 462 | 4620 | 46209 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 463 PERDAGANGAN BESAR MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | G | 463 | 4631 | 46311 | Perdagangan Besar Beras | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 292 | G | 463 | 4631 | 46312 | Perdagangan Besar Buah-buahan | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 293 | G | 463 | 4631 | 46313 | Perdagangan Besar Sayuran | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 294 | G | 463 | 4631 | 46314 | Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 295 | G | 463 | 4631 | 46315 | Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 296 | G | 463 | 4631 | 46319 | Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 297 | G | 463 | 4632 | 46321 | Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahsan | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 298 | G | 463 | 4632 | 46322 | Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahsan | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 299 | G | 463 | 4632 | 46323 | Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahsan Lainnya | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 300 | G | 463 | 4632 | 46324 | Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 301 | G | 463 | 4632 | 46325 | Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 302 | G | 463 | 4632 | 46326 | Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 303 | G | 463 | 4632 | 46327 | Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 304 | G | 463 | 4633 | 46331 | Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 305 | G | 463 | 4633 | 46332 | Perdagangan Besar Produk Roti | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 306 | G | 463 | 4633 | 46334 | Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 307 | G | 463 | 4633 | 46335 | Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 308 | G | 463 | 4633 | 46339 | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 464 PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 309 | G | 464 | 4641 | 46411 | Perdagangan Besar Tekstil | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 310 | G | 464 | 4641 | 46412 | Perdagangan Besar Pakaian | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 311 | G | 464 | 4641 | 46413 | Perdagangan Besar Alas Kaki | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 312 | G | 464 | 4641 | 46414 | Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 313 | G | 464 | 4641 | 46419 | Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki Lainnya | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 314 | G | 464 | 4642 | 46421 | Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 315 | G | 464 | 4642 | 46422 | Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 316 | G | 464 | 4643 | 46430 | Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 317 | G | 464 | 4649 | 46491 | Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 318 | G | 464 | 4649 | 46492 | Perdagangan Besar Farmasi | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 319 | G | 464 | 4649 | 46493 | Perdagangan Besar Obat Tradisional | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 320 | G | 464 | 4649 | 46494 | Perdagangan Besar Kosmetik | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 321 | G | 464 | 4649 | 46495 | Perdagangan Besar Alat Olahraga | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 322 | G | 464 | 4649 | 46496 | Perdagangan Besar Alat Musik | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 323 | G | 464 | 4649 | 46497 | Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 324 | G | 464 | 4649 | 46498 | Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | X | 1 | X | |
| 325 | G | 464 | 4649 | 46499 | Perdagangan Besar Berbagai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | Kategori | Kode 3 Digit | Kode 4 Digit | Kode 5 Digit | KEGIATAN | ZONA | | | | | ZONA BUDIDAYA | | | | | | | | | | ZONA PERUNTUKAN LAINNYA | ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN | | | | | | |
|-----|----------|--------------|--------------|--------------|--|----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------------------------|----------------|------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|---|
| | | | | | | ZONA BADAN AIR | ZONA PERLINDUNG AN SETEMPAT | ZONA RUANG TERBUKA HIJAU | | | ZONA BADAN JALAN | ZONA HUTAN PRODUKSI | ZONA PERTANIAN | | ZONA KAWASAN PERUNTUKA N INDUSTRI | ZONA PARIWISATA | ZONA PERUMAHAN | | ZONA SARANA PELAYANAN UMUM | | | | ZONA PERDAGANGAN DAN JASA | | ZONA PEKANTORAN | | | |
| | | | | | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukaman | Badan Jalan | Hutan Produksi Terbatas | Tanaman Pangan | Perkebunan | Kawasan Peruntukan Industri | Wisata | Rumah Kepadatan Sedang | Rumah Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | | | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perkantoran | |
| | | | | | | BA | PS | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | BJ | HPT | P-1 | P-3 | KPI | W | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | KT | PL-3 | HK | |
| 366 | G | 472 | 4724 | 47241 | Perdagangan Eceran Beras | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X |
| 367 | G | 472 | 4724 | 47242 | Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya | | X | X | T2,B5 | T2,B5 | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | T1, T2, T3 | I | X |
| 368 | G | 472 | 4724 | 47243 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | T1, T2, T3 | I | X |
| 369 | G | 472 | 4724 | 47244 | Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X |
| 370 | G | 472 | 4724 | 47245 | Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X |
| 371 | G | 472 | 4724 | 47249 | Perdagangan Eceran Makanan Lainnya | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X |
| 372 | G | 473 | 4730 | 47301 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di SPBU | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X |
| 373 | G | 473 | 4730 | 47302 | Perdagangan Eceran Premium, Premix Dan Solar Di Toko | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X |
| 374 | G | 473 | 4730 | 47303 | Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X |
| 375 | G | 474 | 4741 | 47411 | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X |
| 376 | G | 474 | 4741 | 47412 | Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X |
| 377 | G | 474 | 4741 | 47413 | Perdagangan Eceran Piranti Lunak (software) | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | T1, T2, T3 | I | X |
| 378 | G | 474 | 4741 | 47414 | Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X |
| 379 | G | 474 | 4741 | 47415 | Perdagangan Eceran Mesin Kantor | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | T1, T2, T3 | I | X |
| 380 | G | 474 | 4742 | 47420 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio Dan Video Di Toko | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X |
| 381 | G | 475 | 4751 | 47511 | Perdagangan Eceran Tekstil | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X |
| 382 | G | 475 | 4751 | 47512 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X |
| 383 | G | 475 | 4751 | 47513 | Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X |
| 384 | G | 475 | 4752 | 47521 | Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X |
| 385 | G | 475 | 4752 | 47522 | Perdagangan Eceran Kaca | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X |
| 386 | G | 475 | 4752 | 47523 | Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X |
| 387 | G | 475 | 4752 | 47524 | Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X |
| 388 | G | 475 | 4752 | 47525 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X |
| 389 | G | 475 | 4752 | 47526 | Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X |
| 390 | G | 475 | 4752 | 47527 | Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X |
| 391 | G | 475 | 4752 | 47528 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X |
| 392 | G | 475 | 4752 | 47529 | Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X |
| 393 | G | 475 | 4753 | 47530 | Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X |
| 394 | G | 475 | 4759 | 47591 | Perdagangan Eceran Furnitur | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X |
| 395 | G | 475 | 4759 | 47592 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X |
| 396 | G | 475 | 4759 | 47593 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X |
| 397 | G | 475 | 4759 | 47594 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X |
| 398 | G | 475 | 4759 | 47595 | Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan | | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | | | | |

| NO | Kategori | Kode 3 Digit | Kode 4 Digit | Kode 5 Digit | KEGIATAN | ZONA BUDIDAYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--------------|--------------|--------------|--|----------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------------------------|----------------|------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| | | | | | | ZONA BADAN AIR | ZONA PERLINDUNGAN AN SETEMPAT | ZONA RUANG TERBUKA HIJAU | | | ZONA BADAN JALAN | ZONA HUTAN PRODUKSI | ZONA PERTANIAN | | ZONA KAWASAN PERUNTUKA N INDUSTRI | ZONA PARIWISATA | ZONA PERUMAHAN | | | | ZONA SARANA PELAYANAN UMUM | | | | ZONA PERDAGANGAN DAN JASA | | ZONA PEKANTORAN | ZONA PERUNTUKAN LAINNYA | ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN |
| | | | | | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukaman | Badan Jalan | Hutan Produksi Terbatas | Tanaman Pangan | Perkebunan | Kawasan Peruntukan Industri | Wisata | Rumah Kepadatan Sedang | Rumah Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perkantoran | IPAM | Perlindungan | | |
| | | | | | | BA | PS | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | BJ | HPT | P-1 | P-3 | KPI | W | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | KT | PL-3 | HK | | |
| 452 | G | 477 | 4779 | 47791 | Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 453 | G | 477 | 4779 | 47792 | Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 454 | G | 477 | 4779 | 47793 | Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 455 | G | 477 | 4779 | 47794 | Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 456 | G | 477 | 4779 | 47795 | Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 457 | G | 477 | 4779 | 47796 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 458 | G | 477 | 4779 | 47797 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 459 | G | 478 | 4781 | 47811 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 460 | G | 478 | 4781 | 47812 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 461 | G | 478 | 4781 | 47813 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 462 | G | 478 | 4781 | 47814 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 463 | G | 478 | 4781 | 47815 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 464 | G | 478 | 4781 | 47816 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 465 | G | 478 | 4781 | 47819 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 466 | G | 478 | 4782 | 47821 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 467 | G | 478 | 4782 | 47822 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 468 | G | 478 | 4782 | 47823 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 469 | G | 478 | 4782 | 47824 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Taucu Dan Oncom | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 470 | G | 478 | 4782 | 47825 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 471 | G | 478 | 4782 | 47826 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 472 | G | 478 | 4782 | 47827 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 473 | G | 478 | 4782 | 47828 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 474 | G | 478 | 4782 | 47829 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytld | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 475 | G | 478 | 4783 | 47831 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 476 | G | 478 | 4783 | 47832 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 477 | G | 478 | 4783 | 47833 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 478 | G | 478 | 4783 | 47834 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 479 | G | 478 | 4784 | 47841 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 480 | G | 478 | 4784 | 47842 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 481 | G | 478 | 4784 | 47843 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 482 | G | 478 | 4784 | 47844 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 483 | G | 478 | 4784 | 47845 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 484 | G | 478 | 4784 | 47846 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/penyegar (minyak Atsiri) | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | T1, T2, T3 | T1, T2, T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 485 | G | 478 | 4784 | 47849 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | Kategori | Kode 3 Digit | Kode 4 Digit | Kode 5 Digit | KEGIATAN | ZONA BUDIDAYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--------------|--------------|--------------|---|----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------------------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | ZONA BADAN AIR | ZONA PERLINDUNG AN | ZONA RUANG TERBUKA HIJAU | | | ZONA BADAN JALAN | ZONA HUTAN PRODUKSI | ZONA PERTANIAN | | ZONA KAWASAN PERUNTUKAN | ZONA PARIWISATA | ZONA PERUMAHAN | | ZONA SARANA PELAYANAN UMUM | | | | ZONA PERDAGANGAN DAN JASA | | ZONA PEKANTORAN | ZONA PERUNTUKAN LAINNYA | ZONA PERTAHANAN DAN | |
| | | | | | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemakaman | Badan Jalan | Hutan Produksi Terbatas | Tanaman Pangan | Perkebunan | Kawasan Peruntukan Industri | Wisata | Rumah Kepadatan Sedang | Rumah Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perkantoran | IPAM | Pertahanan dan Keamanan | |
| | H | | | | | BA | PS | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | BJ | HPT | P-1 | P-3 | KPI | W | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | KT | PL-3 | HK | |
| | | | | | ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 492 ANGKUTAN BUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 533 | H | 492 | 4921 | 49211 | Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (akap) | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | T1 | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | T3 | X |
| 534 | H | 492 | 4921 | 49213 | Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (akdp) | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | T1 | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | T3 | X |
| 535 | H | 492 | 4921 | 49214 | Angkutan Bus Kota | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | T1 | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | T3 | X |
| 536 | H | 492 | 4921 | 49216 | Angkutan Bus Khusus | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | T1 | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | T1, T2, T3 | T3 | X |
| 537 | H | 492 | 4921 | 49219 | Angkutan Bus Bertrayek Lainnya | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | T1 | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | T3 | X |
| 538 | H | 492 | 4922 | 49221 | Angkutan Bus Pariwisata | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | T3 | X |
| 539 | H | 492 | 4922 | 49229 | Angkutan Bus Tidak Bertrayek Lainnya | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | T1 | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | T1, T2, T3 | T3 | X |
| | | | | | 494 ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 540 | H | 494 | 4941 | 49412 | Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (akdp) Bukan Bus, Bertrayek | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | T1 | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | T3 | X |
| 541 | H | 494 | 4941 | 49413 | Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Bertrayek | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | T1 | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | T3 | X |
| 542 | H | 494 | 4941 | 49414 | Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Bertrayek | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | T1 | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | T3 | X |
| 543 | H | 494 | 4941 | 49415 | Angkutan Darat Khusus Bukan Bus | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | T1 | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | T3 | X |
| 544 | H | 494 | 4942 | 49421 | Angkutan Taksi | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | T1 | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | T3 | X |
| 545 | H | 494 | 4942 | 49422 | Angkutan Sewa | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | T1 | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | T3 | X |
| 546 | H | 494 | 4942 | 49423 | Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | T1 | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | T3 | X |
| 547 | H | 494 | 4942 | 49424 | Angkutan Ojek Motor | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | T1 | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | T1, T2, T3 | T3 | X |
| 548 | H | 494 | 4942 | 49425 | Angkutan Darat Wisata | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | T3 | X |
| 549 | H | 494 | 4942 | 49429 | Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | T3 | X |
| 550 | H | 494 | 4943 | 49431 | Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | T3 | X |
| 551 | H | 494 | 4943 | 49432 | Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | T1 | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | T3 | X |
| 552 | H | 494 | 4943 | 49433 | Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | T3 | X |
| 553 | H | 494 | 4944 | 49442 | Angkutan Jalan Rel Wisata | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | X | X |
| 554 | H | 494 | 4945 | 49450 | Angkutan Jalan Rel Lainnya | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | T1 | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | X | X |
| | | | | | ANGKUTAN PERAIRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 502 ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 555 | H | 502 | 5021 | 50211 | Angkutan Sungai Dan Danau Liner (trayek Tetap Dan Teratur) Untuk Penumpang | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | X | X |
| 556 | H | 502 | 5021 | 50212 | Angkutan Sungai Dan Danau Trampler (trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | X | X |
| 557 | H | 502 | 5021 | 50213 | Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Wisata Dan Yhdi | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | X | X |
| 558 | H | 502 | 5021 | 50216 | Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/kota Untuk Penumpang | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | X | X |
| 559 | H | 502 | 5021 | 50217 | Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota Untuk Penumpang | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | X | X |
| 560 | H | 502 | 5021 | 50218 | Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/kota Untuk Penumpang | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | X | X |
| 561 | H | 502 | 5022 | 50221 | Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Umum Dan Atau Hewan | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | T1 | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | X | X |
| 562 | H | 502 | 5022 | 50222 | Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | T1 | X | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | X | X |
| | | | | | PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 521 PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 563 | H | 521 | 5210 | 52101 | Pergudangan Dan Penyimpanan | X | X | X | X | X | X | X | x | x | I | X | X | X | B1 | X | X | X | X | I | I | X | T3 | X |
| 564 | H | 521 | 5210 | 52102 | Aktivitas Cold Storage | X | X | X | X | X | X | X | x | x | I | X | X | X | B1 | X | X | X | X | I | I | X | T3 | X |
| 565 | H | 521 | 5210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | Kategori | Kode 3 Digit | Kode 4 Digit | Kode 5 Digit | KEGIATAN | ZONA BUDIDAYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--------------|---|--------------|--|----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------------------------|----------------|------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | | | | | ZONA BADAN AIR | ZONA PERLINDUNG AN SETEMPAT | ZONA RUANG TERBUKA HIJAU | | | ZONA BADAN JALAN | ZONA HUTAN PRODUKSI | ZONA PERTANIAN | | ZONA KAWASAN PERUNTUKA N INDUSTRI | ZONA PARIWISATA | ZONA PERUMAHAN | | | | ZONA SARANA PELAYANAN UMUM | | | | ZONA PERDAGANGAN DAN JASA | | ZONA PEKANTORAN | ZONA PERUNTUKAN LAINNYA | ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN |
| | | | | | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukaman | Badan Jalan | Hutan Produksi Terbatas | Tanaman Pangan | Perkebunan | Kawasan Peruntukan Industri | Wisata | Rumah Kepadatan Sedang | Rumah Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perkantoran | IPAM | Pertahanan dan Keamanan | | |
| | | | | | BA | PS | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | BJ | HPT | P-1 | P-3 | KPI | W | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | KT | PL-3 | HK | | | |
| | | 652 | REASURANSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 671 | K | 652 | 6520 | 65201 | Reasuransi Konvensional | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | | |
| 672 | K | 652 | 6520 | 65202 | Reasuransi Syariah | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | | |
| | | 653 | DANA PENSUIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 673 | K | 653 | 6530 | 65301 | Dana Pensiun Pemberi Kerja | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | | |
| 674 | K | 653 | 6530 | 65302 | Dana Pensiun Lembaga Keuangan | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | | |
| | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 681 | REAL ESTATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 681 | REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN KAWASAN PARIWISATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 675 | L | 681 | 6811 | 68110 | Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | I | I | X | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 676 | L | 681 | 6812 | 68120 | Kawasan Pariwisata | X | X | T2,B1 | T2,B1 | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 677 | L | 681 | 6813 | 68130 | Kawasan Industri | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| | | 682 | REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 678 | L | 682 | 6820 | 68200 | Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (fee) Atau Kontrak | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | I | I | X | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| | M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 691 | AKTIVITAS HUKUM DAN AKUNTANSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 691 | AKTIVITAS HUKUM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 679 | M | 691 | 6910 | 69101 | Aktivitas Pengacara | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | T3 | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | | |
| 680 | M | 691 | 6910 | 69102 | Aktivitas Konsultan Hukum | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | T3 | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | | |
| 681 | M | 691 | 6910 | 69103 | Aktivitas Konsultan Kelayaan Intelektual | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | T3 | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | | |
| 682 | M | 691 | 6910 | 69104 | Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | T3 | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | | |
| 683 | M | 691 | 6910 | 69109 | Aktivitas Hukum Lainnya | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | T3 | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | | |
| 684 | M | 692 | 6920 | 69201 | Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | T3 | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | | |
| 685 | M | 692 | 6920 | 69202 | Aktivitas Konsultasi Pajak | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | T3 | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | | |
| | | 702 | AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 702 | AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 686 | M | 702 | 7020 | 70201 | Aktivitas Konsultasi Pariwisata | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | X | T3 | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | | |
| 687 | M | 702 | 7020 | 70202 | Aktivitas Konsultasi Transportasi | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | X | T3 | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | | |
| 688 | M | 702 | 7020 | 70203 | Aktivitas Kehumasan | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | X | T3 | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | | |
| 689 | M | 702 | 7020 | 70204 | Aktivitas Konsultasi Investasi Dan Perdagangan Berjangka | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | X | T3 | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | | |
| 690 | M | 702 | 7020 | 70209 | Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | X | T3 | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | | |
| | | 711 | AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 711 | AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 691 | M | 711 | 7110 | 71101 | Aktivitas Arsitektur | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | T3 | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | | |
| 692 | M | 711 | 7110 | 71102 | Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis Ybdi | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | T3 | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | | |
| 693 | M | 712 | 7120 | 71201 | Jasa Sertifikasi | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | T3 | T3 | X | X | X | X | I | I | I | I | X | | |
| 694 | M | 712 | 7120 | 71202 | Jasa Pengujian Laboratorium | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | T3 | T3 | T3 | X | X | X | I | I | I | I | X | | |
| 695 | M | 712 | 7120 | 71203 | Jasa Inspeksi Periodik | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | T3 | T3 | X | X | X | X | I | I | I | I | X | | |
| 696 | M | 712 | 7120 | 71204 | Jasa Inspeksi Teknik Instalasi | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | T3 | T3 | X | X | X | X | I | I | I | I | X | | |
| 697 | M | 712 | 7120 | 71205 | Jasa Kalibrasi/ metrologi | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | T3 | T3 | X | X | X | X | I | I | I | I | X | | |
| 698 | M | 712 | 7120 | 71209 | Analisis Dan Uji Teknis Lainnya | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | T3 | X | X | X | X | I | I | I | I | X | | |
| | | 721 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 721 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | Kategori | Kode 3 Digit | Kode 4 Digit | Kode 5 Digit | KEGIATAN | ZONA BUDIDAYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--------------|--------------|--------------|---|----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------------------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| | | | | | | ZONA BADAN AIR | ZONA PERLINDUNG AN SETEMPAT | ZONA RUANG TERBUKA HIJAU | | | ZONA BADAN JALAN | ZONA HUTAN PRODUKSI | ZONA PERTANIAN | | ZONA KAWASAN PERUNTUKA N | ZONA PARIWISATA | ZONA PERUMAHAN | | | ZONA SARANA PELAYANAN UMUM | | | | ZONA PERDAGANGAN DAN JASA | | ZONA PEKANTORAN | ZONA PERUNTUKAN LAINNYA | ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN |
| | | | | | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukaman | Badan Jalan | Hutan Produksi Terbatas | Tanaman Pangan | Perkebunan | Kawasan Peruntukan Industri | Wisata | Rumah Kepadatan Sedang | Rumah Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perkantoran | IPAM | Pertahanan dan Keamanan | |
| | | | | | | BA | PS | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | BJ | HPT | P-1 | P-3 | KPI | W | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | KT | PL-3 | HK | |
| 730 | N | 773 | 7730 | 77302 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | |
| 731 | N | 773 | 7730 | 77303 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | |
| 732 | N | 773 | 7730 | 77305 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | |
| 733 | N | 773 | 7730 | 77306 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | |
| 734 | N | 773 | 7730 | 77307 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | |
| 735 | N | 773 | 7730 | 77309 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya Ytdl | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | |
| 736 | N | 773 | 7739 | 77393 | Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | |
| AKTIVITAS KETENAGAKERJAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 781 AKTIVITAS PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 737 | N | 781 | 7810 | 78101 | Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | |
| 738 | N | 781 | 7810 | 78102 | Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | |
| AKTIVITAS AGEN PERJALANAN, PENYELENGGARA TUR DAN JASA RESERVASI LAINNYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 791 AKTIVITAS AGEN PERJALANAN DAN PENYELENGGARA TUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 739 | N | 791 | 7911 | 79111 | Aktivitas Agen Perjalanan Wisata | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | |
| 740 | N | 791 | 7911 | 79112 | Aktivitas Agen Perjalanan Bukan Wisata | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | |
| 741 | N | 791 | 7912 | 79120 | Aktivitas Biro Perjalanan Wisata | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | |
| 799 JASA RESERVASI LAINNYA DAN KEGIATAN YBDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 742 | N | 799 | 7991 | 79911 | Jasa Informasi Pariwisata | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | T3 | T3 | X | X | X | X | I | I | I | I | X | |
| 743 | N | 799 | 7991 | 79912 | Jasa Informasi Wisata Alam | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | T3 | T3 | X | X | X | X | I | I | I | I | X | |
| 744 | N | 799 | 7992 | 79921 | Jasa Pramuwisata | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | T3 | T3 | X | X | X | X | I | I | I | I | X | |
| 745 | N | 799 | 7992 | 79922 | Jasa Interpreter Wisata | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | T3 | T3 | X | X | X | X | I | I | I | I | X | |
| 746 | N | 799 | 7999 | 79990 | Jasa Reservasi Lainnya Ybdi Ytdl | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | T3 | T3 | X | X | X | X | I | I | I | I | X | |
| AKTIVITAS KEAMANAN DAN PENYELIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 802 AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 747 | N | 802 | 8020 | 80200 | Aktivitas Jasa Sistem Keamanan | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | |
| 748 | N | 803 | 8030 | 80300 | Aktivitas Penyelidikan | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | I | I | I | X | X | X | I | I | I | I | X | |
| AKTIVITAS PENYEDIA JASA UNTUK GEDUNG DAN PERTAMANAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 811 AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 749 | N | 811 | 8110 | 81100 | Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | |
| 812 AKTIVITAS KEBERSIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | N | 812 | 8121 | 81210 | Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | |
| 751 | N | 812 | 8129 | 81290 | Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | I | I | I | I | I | I | I | I | X | |
| 752 | N | 813 | 8130 | 81300 | Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | |
| AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR, AKTIVITAS PENUNJANG KANTOR DAN AKTIVITAS PENUNJANG USAHA LAINNYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 821 AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR DAN PENUNJANG KANTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 753 | N | 821 | 8211 | 82110 | Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | |
| 754 | N | 821 | 8219 | 82190 | Aktivitas Foto Kopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | I | I | X | X | X | X | I | I | I | I | X | |
| 822 AKTIVITAS CALL CENTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 755 | N | 822 | 8220 | 82200 | Aktivitas Call Centre | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | |
| 823 PENYELENGGARA KONVENSI DAN PAMERAN DAGANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 756 | N | 823 | 8230 | 82301 | Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | |
| 757 | N | 823 | 8230 | 82302 | Event Organizer | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | Kategori | Kode 3 Digit | Kode 4 Digit | Kode 5 Digit | KEGIATAN | ZONA BUDIDAYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--------------|---|--------------|--|----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| | | | | | | ZONA BADAN AIR | ZONA PERLINDUNG AN SETEMPAT | ZONA RUANG TERBUKA HIJAU | | | | ZONA BADAN JALAN | ZONA HUTAN PRODUKSI | ZONA PERTANIAN | | ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI | ZONA PARIWISATA | ZONA PERUMAHAN | | | | ZONA SARANA PELAYANAN UMUM | | | | ZONA PERDAGANGAN DAN JASA | | ZONA PEKANTORAN | ZONA PERUNTUKAN LAINNYA | ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN |
| | | | | | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemakaman | Badan Jalan | Hutan Produksi Terbatas | Tanaman Pangan | Perkebunan | Kawasan Perindustrian | Wisata | Rumah Kepadatan Sedang | Rumah Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perkantoran | IPAM | Pertahanan dan Keamanan | | | |
| | | | | | | BA | PS | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | BJ | HPT | P-1 | P-3 | KPI | W | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | KT | PL-3 | HK | | | |
| | | 854 | PENDIDIKAN LAINNYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 793 | P | 854 | 8541 | 85410 | Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | | | |
| 794 | P | 854 | 8542 | 85420 | Pendidikan Kebudayaan | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | | | |
| 795 | P | 854 | 8543 | 85430 | Pendidikan Lainnya Pemerintah | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | | | |
| 796 | P | 854 | 8549 | 85491 | Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | X | | | |
| 797 | P | 854 | 8549 | 85492 | Jasa Pendidikan Komputer (teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | | | |
| 798 | P | 854 | 8549 | 85493 | Pendidikan Bahasa Swasta | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | | | |
| 799 | P | 854 | 8549 | 85494 | Pendidikan Kesehatan Swasta | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | | | |
| 800 | P | 854 | 8549 | 85495 | Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | | | |
| 801 | P | 854 | 8549 | 85497 | Pendidikan Teknik Swasta | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T1 | X | T3 | T3 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | | | |
| 802 | P | 854 | 8549 | 85498 | Pendidikan Kerajinan Dan Industri | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T1 | X | T3 | T3 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | | | |
| 803 | P | 854 | 8549 | 85499 | Pendidikan Lainnya Swasta | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T1 | X | T3 | T3 | I | I | I | I | I | I | I | I | X | | | |
| | | 855 | KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 804 | P | 855 | 8550 | 85500 | Kegiatan Penunjang Pendidikan | X | T1,B1 | X | X | X | T1 | T1,B1 | x | x | x | X | T3 | T3 | I | I | I | I | I | I | I | X | I | X | | |
| | Q | | AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 861 | AKTIVITAS RUMAH SAKIT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 805 | Q | 861 | 8610 | 86101 | Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | I | X | X | X | B1 | B1 | T3 | I | X | | | |
| 806 | Q | 861 | 8610 | 86102 | Aktivitas Puskesmas | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T2 | X | T3 | T3 | I | I | I | I | B1 | B1 | T3 | I | X | | | |
| 807 | Q | 861 | 8610 | 86103 | Aktivitas Rumah Sakit Swasta | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | I | X | X | X | B1 | B1 | T3 | I | X | | | |
| 808 | Q | 861 | 8610 | 86104 | Aktivitas Poliklinik Swasta | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T2 | X | T3 | T3 | I | I | I | I | B1 | B1 | T3 | I | X | | | |
| 809 | Q | 861 | 8610 | 86109 | Aktivitas Rumah Sakit Lainnya | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | I | X | X | X | B1 | B1 | T3 | I | X | | | |
| | | 862 | AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 810 | Q | 862 | 8620 | 86201 | Aktivitas Praktik Dokter Umum | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T2 | X | T3 | T3 | I | I | I | I | B1 | B1 | T3 | I | X | | | |
| 811 | Q | 862 | 8620 | 86202 | Aktivitas Praktik Dokter Spesialis | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | I | I | I | I | B1 | B1 | T3 | I | X | | | |
| 812 | Q | 862 | 8620 | 86203 | Aktivitas Praktik Dokter Gigi | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | I | I | I | I | B1 | B1 | T3 | I | X | | | |
| | | 869 | AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN MANUSIA LAINNYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 813 | Q | 869 | 8690 | 86901 | Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | I | I | I | I | B3 | B3 | T3 | I | X | | | |
| 814 | Q | 869 | 8690 | 86902 | Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | I | I | I | I | B3 | B3 | T3 | I | X | | | |
| 815 | Q | 869 | 8690 | 86903 | Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | I | I | I | I | B3 | B3 | T3 | I | X | | | |
| 816 | Q | 869 | 8690 | 86904 | Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (medical Evacuation) | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | I | I | I | I | B3 | B3 | T3 | I | X | | | |
| | | | AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 871 | AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PERAWATAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 817 | Q | 871 | 8710 | 87100 | Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | I | I | X | X | B3 | B3 | I | I | X | | | |
| | | 872 | AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK KETERBELAKANGAN MENTAL, GANGGUAN MENTAL DAN PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 818 | Q | 872 | 8720 | 87201 | Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | I | X | X | X | I | I | I | I | X | | | |
| 819 | Q | 872 | 8720 | 87202 | Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | I | X | X | X | I | I | I | I | X | | | |
| 820 | Q | 872 | 8720 | 87203 | Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Alkohol , Psikotropika Dan Zat Adiktif lainnya | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | I | X | X | X | I | I | I | I | X | | | |
| | | 873 | AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 821 | Q | 873 | 8730 | 87301 | Aktivitas Sosial Pemerintah Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | I | X | X | X | I | I | I | I | X | | | |
| 822 | Q | 873 | 8730 | 87302 | Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | I | X | X | X | I | I | I | I | X | | | |
| 823 | Q | 873 | 8730 | 87303 | Aktiv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | Kategori | Kode 3 Digit | Kode 4 Digit | Kode 5 Digit | KEGIATAN | ZONA BUDIDAYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------|--------------|--------------|---|----------------|---|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------------------------|----------------|------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| | | | | | | ZONA BADAN AIR | ZONA PERLINDUNG AN <small>SETEMPAT</small> | ZONA RUANG TERBUKA HIJAU | | | ZONA BADAN JALAN | ZONA HUTAN PRODUKSI | ZONA PERTANIAN | | ZONA KAWASAN PERUNTUKAN <small>INDUSTRI</small> | ZONA PARIWISATA | ZONA PERUMAHAN | | | ZONA SARANA PELAYANAN UMUM | | | | ZONA PERDAGANGAN DAN JASA | | ZONA PEKANTORAN | ZONA PERUNTUKAN LAINNYA | ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN |
| | | | | | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukaman | Badan Jalan | Hutan Produksi Terbatas | Tanaman Pangan | Perkebunan | Kawasan Peruntukan Industri | Wisata | Rumah Kepadatan Sedang | Rumah Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perkantoran | IPAM | Pertahanan dan Keamanan | |
| | | | | | | BA | PS | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | BJ | HPT | P-1 | P-3 | KPI | W | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | KT | PL-3 | HK | |
| 860 | R | 931 | 9311 | 93116 | Lapangan Tenis Lapangan | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | I | I | X | X | X | X | I | I | T3 | X | X |
| 861 | R | 931 | 9311 | 93117 | Aktivitas Pusat Kebugaran/fitness Center | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | I | I | X | X | X | X | I | I | T3 | X | X | |
| 862 | R | 931 | 9311 | 93118 | Sport Centre | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | I | I | X | X | X | X | I | I | T3 | I | X | |
| 863 | R | 931 | 9311 | 93119 | Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | I | I | X | X | X | X | I | I | T3 | X | X | |
| 864 | R | 931 | 9312 | 93121 | Klub Sepak Bola | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | |
| 865 | R | 931 | 9312 | 93122 | Klub Golf | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | |
| 866 | R | 931 | 9312 | 93123 | Klub Renang | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | |
| 867 | R | 931 | 9312 | 93124 | Klub Tenis Lapangan | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | |
| 868 | R | 931 | 9312 | 93125 | Klub Tinju | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | |
| 869 | R | 931 | 9312 | 93126 | Klub Bela Diri | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | |
| 870 | R | 931 | 9312 | 93127 | Klub Kebugaran/fitness Dan Binaraga | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | |
| 871 | R | 931 | 9312 | 93128 | Klub Bowling | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | |
| 872 | R | 931 | 9312 | 93129 | Klub Olahraga Lainnya | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | |
| 873 | R | 931 | 9319 | 93191 | Promotor Kegiatan Olahraga | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | |
| 874 | R | 931 | 9319 | 93192 | Olahragawan, Juri Dan Wasit Profesional | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | |
| 875 | R | 931 | 9319 | 93193 | Aktivitas Perburuan | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | |
| 876 | R | 931 | 9319 | 93194 | Badan Regulasi Dan Liga Olahraga | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | I | X | |
| 877 | R | 931 | 9319 | 93199 | Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T3 | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | |
| 932 AKTIVITAS REKREASI LAINNYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 878 | R | 932 | 9321 | 93210 | Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan | X | X | T2,B1 | T2,B1 | X | X | X | x | x | x | I | T3 | T3 | X | X | X | X | T3 | T3 | T3 | X | T1 | |
| 879 | R | 932 | 9322 | 93221 | Pemandian Alam | X | X | T2,B1 | T2,B1 | X | X | X | x | x | x | I | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | X | T1 | |
| 880 | R | 932 | 9322 | 93223 | Wisata Petualangan Alam | X | T2,B1 | T2,B1 | T2,B1 | X | X | T2,B1 | x | x | x | I | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | X | T1 | |
| 881 | R | 932 | 9322 | 93229 | Daya Tarik Wisata Alam Lainnya | X | T2,B1 | T2,B1 | T2,B1 | X | X | T2,B1 | x | x | x | I | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | X | T1 | |
| 882 | R | 932 | 9323 | 93231 | Wisata Agro | X | X | X | X | X | X | X | x | x | I | I | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | X | T1 | |
| 883 | R | 932 | 9323 | 93232 | Taman Rekreasi/taman Wisata | X | X | T2,B1 | T2,B1 | X | X | X | x | x | x | I | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | X | T1 | |
| 884 | R | 932 | 9323 | 93233 | Kolam Pemandangan | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | T3 | T3 | X | X | X | X | T3 | T3 | X | X | T1 | |
| 885 | R | 932 | 9323 | 93239 | Daya Tarik Wisata Buatan/binaan Manusia Lainnya | X | X | T2,B1 | T2,B1 | X | X | X | x | x | x | I | T3 | T3 | X | X | X | X | T3 | T3 | X | X | T1 | |
| 886 | R | 932 | 9324 | 93241 | Arung Jeram | I | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | X | T1 | |
| 887 | R | 932 | 9324 | 93242 | Wisata Selam | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | X | T1 | |
| 888 | R | 932 | 9324 | 93249 | Wisata Tirta Lainnya | I | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | X | T1 | |
| 889 | R | 932 | 9329 | 93291 | Kelab Malam Dan Atau Diskotik | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | X | X | |
| 890 | R | 932 | 9329 | 93292 | Karaoke | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | X | T1 | |
| 891 | R | 932 | 9329 | 93293 | Usaha Arena Permainan | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | X | T1 | |
| 892 | R | 932 | 9329 | 93299 | Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | I | X | X | X | X | X | X | T3 | T3 | X | X | T1 | |
| S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKTIVITAS KEANGGOTAAN ORGANISASI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 941 AKTIVITAS ORGANISASI BISNIS, PENGUSAHA DAN PROFESI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 893 | S | 941 | 9411 | 94110 | Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T2 | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | |
| 894 | S | 941 | 9412 | 94121 | Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T2 | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | |
| 895 | S | 941 | 9412 | 94122 | Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi | X | X | X | X | X | X | X | x | x | T2 | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | |
| 942 AKTIVITAS ORGANISASI BURUH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 896 | S | 942 | 9420 | 94200 | Aktivitas Organisasi Buruh | X | X | X | X | X | X | X | x | x | I | X | X | X | X | X | X | X | I | I | I | I | X | |
| 949 AKTIVITAS ORGANISASI LAINNYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 897 | S | 949 | 9491 | 94910 | Aktivitas Organisasi Keagamaan | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | X | X | X | X | I | I | I | I | X | |
| 898 | S | 949 | 9492 | 94920 | Aktivitas Organisasi Politik | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | X | X | X | X | I | I | I | I | X | |
| 899 | S | 949 | 9499 | 94990 | Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya Ytdl | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | X | X | X | X | I | I | I | I | X | |
| REPARASI KOMPUTER DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 951 REPARASI KOMPUTER DAN ALAT KOMUNIKASI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | S | 951 | 9511 | 95110 | Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | |
| 901 | S | 951 | 9512 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | Kategori | Kode 3 Digit | Kode 4 Digit | Kode 5 Digit | KEGIATAN | ZONA BUDIDAYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|---|----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|-------------------------|----------------|------------|----------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | | | | | ZONA BADAN AIR | ZONA PERLINDUNG AN SETEMPAT | ZONA RUANG TERBUKA HIJAU | | | ZONA BADAN JALAN | ZONA HUTAN PRODUKSI | ZONA PERTANIAN | | ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI | ZONA PARIWISATA | ZONA PERUMAHAN | | | | ZONA SARANA PELAYANAN UMUM | | | | ZONA PERDAGANGAN DAN JASA | | ZONA PEKANTORAN | ZONA PERUNTUKAN LAINNYA | ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN |
| | | | | | | Badan Air | Perlindungan Setempat | Taman Kecamatan | Taman Kelurahan | Pemukaman | Badan Jalan | Hutan Produksi Terbatas | Tanaman Pangan | Perkebunan | Kawan Peruntukan Industri | Wisata | Rumah Kepadatan Sedang | Rumah Kepadatan Rendah | SPU Skala Kota | SPU Skala Kecamatan | SPU Skala Kelurahan | SPU Skala RW | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | Perdagangan dan Jasa Skala WP | Perkantoran | IPAM | Pertahanan dan Keamanan | | |
| | | | | | | BA | PS | RTH-3 | RTH-4 | RTH-7 | BJ | HPT | P-1 | P-3 | KPI | W | R-3 | R-4 | SPU-1 | SPU-2 | SPU-3 | SPU-4 | K-1 | K-2 | KT | PL-3 | HK | | |
| 904 | S | 952 | 9523 | 95230 | Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 905 | S | 952 | 9524 | 95240 | Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 906 | S | 952 | 9529 | 95290 | Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 961 AKTIVITAS JASA PERORANGAN UNTUK KEBUGARAN, BUKAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 907 | S | 961 | 9611 | 96111 | Aktivitas Pangkas Rambut | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 908 | S | 961 | 9611 | 96112 | Aktivitas Salon Kecantikan | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 909 | S | 961 | 9612 | 96121 | Aktivitas Panti Pijat | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 910 | S | 961 | 9612 | 96122 | Aktivitas Spa (sante Par Aqua) | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 911 | S | 961 | 9612 | 96129 | Aktivitas Kebugaran Lainnya | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| | | | | | 962 AKTIVITAS BINATU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 912 | S | 962 | 9620 | 96200 | Aktivitas Binatu (laundry, pencucian) | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| | | | | | 969 9 AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 913 | S | 969 | 9691 | 96910 | Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan Ybdi | X | X | X | X | I | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | X | X | X | X | I | I | X | X | X | | |
| 914 | S | 969 | 9699 | 96991 | Aktivitas Vermak Pakaian | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| 915 | S | 969 | 9699 | 96999 | Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | T3 | T3 | X | X | X | X | I | I | X | I | X | | |
| RUMAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 916 | | | | | rumah tunggal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | X | T2 | T2 | X | I | X | | |
| 917 | | | | | rumah kopel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | X | T2 | T2 | X | I | X | | |
| 918 | | | | | rumah deret | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | X | T2 | T2 | X | I | X | | |
| 919 | | | | | townhouse/komplek perumahan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | X | T2 | T2 | X | X | X | | |
| 920 | | | | | rumah susun rendah | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | X | T1 | T1 | X | X | T1 | | |
| 921 | | | | | rumah susun sedang | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | X | T1 | T1 | X | X | T1 | | |
| 922 | | | | | rumah susun tinggi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | X | T1 | T1 | X | X | T1 | | |
| 923 | | | | | asrama | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3 | X | I | I | X | X | X | X | T2 | T2 | X | X | X | | |
| 924 | | | | | rumah kost | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | X | T2 | T2 | X | I | X | | |
| 925 | | | | | rumah dinas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | T3 | X | I | I | X | X | X | X | T2 | T2 | X | I | X | | |
| 926 | | | | | rumah sederhana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | X | T2 | T2 | X | I | X | | |
| 927 | | | | | rumah menengah | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | X | T2 | T2 | X | I | X | | |
| 928 | | | | | rumah mewah | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | X | T2 | T2 | X | I | X | | |
| 929 | | | | | rumah adat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | I | X | X | X | X | T2 | T2 | X | I | X | | |

Catatan
Selain disesuaikan dengan KBLI juga di crooscheck dengan data observasi lapangan
Untuk kegiatan rumah menacu pada lampiran Permen ATR 16 tahun 2018

KETERANGAN:

| | |
|----|---|
| I | Kegiatan Pemanfaatan ruang yang di perbolehkan/diizinkan |
| T | Kegiatan Pemanfaatan ruang yang diizinkan Terbatas |
| T1 | Diperbolehkan secara terbatas hanya pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara badan usaha dan/ atau masyarakat dengan pemerintah daerah melalui rekomendasi dinas terkait |
| T2 | Diperbolehkan secara terbatas dengan pembatasan luas |
| T3 | Diperbolehkan secara terbatas dengan pembatasan secara eksisting |
| B | Kegiatan Pemanfaatan ruang yang diizinkan dengan bersyarat tertentu |
| B1 | Diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/SPPL), dan wajib memenuhi persyaratan hasil kajian lingkungan hidup yang telah dilakukan sesuai rekomendasi dinas terkait. |
| B2 | Memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat |
| B3 | Diperbolehkan dengan syarat wajib melalui rekomendasi FPR dan/atau TABG untuk bangunan gedung untuk umum, serta dilengkapi dengan jumlah rencana kapasitas pengguna |
| B4 | Melakukan persyaratan sarana dan prasarana minimum berdasarkan Lampiran Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimal |
| B5 | Bersyarat mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait |
| X | Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan |

TANDA TANGAN PENGESAHAN

Mengetanui

PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

H. MUKTI SE.,ME

Lampiran XVII Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

| KAWASAN | ZONA | SUBZONA | KODE | INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG | | |
|----------|----------------------------------|---------------------------------------|-------|------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| | | | | KDB Maksimum (%) | KLB Maksimum | Koefisian Dasar Hijau Minimum (%) |
| LINDUNG | Zona Badan Air | Badan Air | BA | - | - | - |
| | Zona Perlindungan Setempat | Perlindungan Setempat | PS | 10 | - | 80 |
| | Zona Ruang Terbuka Hijau | Taman Kecamatan | RTH-3 | 15 | 0.15 | 80 |
| | | Taman Kelurahan | RTH-4 | 20 | 0.2 | 60 |
| | | Pemukaman | RTH-7 | 10 | 0.1 | 70 |
| | | | | | | |
| BUDIDAYA | Zona Badan Jalan | Badan Jalan | BJ | - | - | - |
| | Zona Hutan Produksi | Hutan Produksi Tetap | HPT | - | - | - |
| | Zona Pertanian | Tanaman Pangan | P-1 | 10 | 0.1 | 85 |
| | | Perkebunan | P-3 | 10 | 0.1 | 85 |
| | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Kawasan Peruntukan Industri | KPI | 50 | 1 | 40 |
| | Zona Pariwisata | Pariwisata | W | 50 | 1.5 | 70 |
| | Zona Perumahan | Perumahan Kepadatan Sedang | R-3 | 60 | 1.8 | 20 |
| | | Perumahan Kepadatan Rendah | R-4 | 50 | 1.8 | 20 |
| | Zona Sarana Pelayanan Umum | SPU Skala Kota | SPU-1 | 50 | 1 | 40 |
| | | SPU Skala Kecamatan | SPU-2 | 50 | 1.5 | 40 |
| | | SPU Skala Kelurahan | SPU-3 | 40 | 0.8 | 50 |
| | | SPU Skala RW | SPU-4 | 40 | 0.8 | 50 |
| | Zona Perdagangan dan Jasa | Perdagangan dan Jasa Skala Kota | K-1 | 65 | 1.95 | 10 |
| | | Perdagangan dan Jasa Skala WP | K-2 | 65 | 1.95 | 10 |
| | Zona Perkantoran | Perkantoran | KT | 60 | 2.4 | 15 |
| | Zona Peruntukan Lainnya | Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) | PL-3 | 80 | 0.8 | 5 |
| | Zona Pertahanan dan Keamanan | Pertahanan dan Keamanan | HK | 80 | 1.6 | 20 |

Lampiran XVIII Ketentuan Tata Bangunan

| Kawasan | Zona | Sub Zona | Kode | Ketentuan Tata Bangunan | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------|
| | | | | Garis Sempadan Bangunan (m) | | | | Ketinggian Bangunan Maksimum (m) | Jumlah Lantai Maksimum | Jarak Bebas Bangunan Minimum (m) | |
| | | | | Kolektor Primer | Kolektor Sekunder | Jalan Lokal Primer | Jalan Lingkungan Primer | | | JBB Samping | JBB Belakang |
| LINDUNG | Zona Badan Air | Badan Air | BA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zona Perlindungan Setempat | Perlindungan Setempat | PS | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - |
| | Zona Ruang Terbuka Hiaju | Taman Kecamatan | RTH-3 | - | - | - | 2 | 8 | 2 | - | - |
| | | Taman Kelurahan | RTH-4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | - | - |
| | | Pemakaman | RTH-7 | 5 | - | 3 | - | 8 | 2 | - | - |
| | | | | | | | | | | | |
| BUDI DAYA | Zona Badan Jalan | Badan Jalan | BJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zona Hutan Produksi | Hutan Produksi Terbatas | HPT | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Zona Pertanian | Tanaman Pangan | P-1 | - | - | 3 | 2 | 8 | 2 | - | - |
| | | Perkebunan | P-3 | - | - | 3 | 2 | 8 | 2 | - | - |
| | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Kawasan Peruntukan Industri | KPI | 5 | - | 3 | 2 | 8 | 2 | - | - |
| | Zona Pariwisata | Pariwisata | W | - | - | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| | Zona Perumahan | Kepadatan Sedang | R-3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12 | 3 | 3 | 3 |
| | | Kepadatan Rendah | R-4 | - | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| | Zona Sarana Pelayanan Umum | SPU Skala Kota | SPU-1 | 5 | - | 3 | 2 | 12 | 3 | - | - |
| | | SPU Skala Kecamatan | SPU-2 | - | - | 3 | 2 | 12 | 3 | - | - |
| | | SPU Skala Kelurahan | SPU-3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | - | - |
| | | SPU Skala RW | SPU-4 | - | - | 3 | 2 | 8 | 2 | - | - |
| | Zona Perdagangan dan Jasa | Perdagangan dan Jasa skala kota | K-1 | 5 | - | 3 | - | 12 | 3 | - | 4 |
| | | Perdagangan dan jasa skala WP | K-2 | 5 | - | 3 | - | 12 | 3 | - | 4 |
| | Zona Perkantoran | Perkantoran | KT | 5 | - | 3 | 2 | 12 | 3 | 4 | 4 |
| Zona Peruntukan Lainnya | IPAM | PL-3 | 5 | - | - | - | 8 | 2 | - | - | |
| Zona Pertahanan dan Keamanan | Pertahanan dan Keamanan | HK | 8 | | 4 | - | 12 | 3 | 3 | 3 | |

CATATAN:
Menggunakan Rumus Untuk Pengisian GSB dengan Jalan
TB= 1 lantai bangunan = 4 m. Plus atap 4 m.

Lampiran XIX Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

| Kawasan | Zona | Sub Zona | KETENTUAN SARANA PRASARANA |
|----------|----------------------------|--|--|
| LINDUNG | Zona Perlindungan Setempat | Perlindungan Setempat (PS) | 1) Sarana pengamanan sungai berupa Tanggul (apabila memenuhi syarat kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan yag berlaku), Pagar Pengaman |
| | | | 2) Tanaman Pelindung sesuai Aturan Perundang-undangan terkait Jenis dan Kerapatan Penanaman |
| | Zona Ruang Terbuka Hijau | Taman Kecamatan (RTH-3), Taman Kelurahan (RTH-4), Pemakaman (RTH-7), | 3) Sarana Prasarana Pendukug yang semi permanen dan diizinkan peraturan yang berlaku seperti : Mushalla, JoggingTrack, Toilet, Tenda-tenda Jajanan, Tempat Parkir Hijau, dsb |
| | | | 1) Dapat Berupa Taman Buatan dengan Tingkat Penyerapan Air yang Tinggi |
| | | | 2) Dapat berupa Taman Bermain Anak atau Ruang Sosialisasi Publik yang memiliki tingkat penyerapan air tinggi |
| | | | 3) Dapat disertai Lapangan Parkir Terbatas yang memiliki tingkat penyerapan air tinggi |
| | | | 4) Dapat disertai Mushalla, Toilet, Jogging Track dan Sarana Pendukung Taman Kota, taman kecamatan dan taman kelurahan Lainnya dengan |
| | | | 5) Aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parklr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu |
| | | | 6) Jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. |
| | | | 7) Jalur sepeda; diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir |
| | | | 8) Jaringan Telekomunikasi |
| | | | - kelengkapan telekomunikasi : wifi |
| | | | 9) Penyediaan ruang untuk PKL |
| | | | · Dapat disertai Lapangan Parkir Terbatas yang memiliki tingkat penyerapan air tinggi. |
| | | | · Dapat disertai Mushalla, Toilet, dan Sarana Pendukung Sarana Pemakaman Lainnya dengan bangunan semi permanen, ada pengelolaan limbah dan penanganan drainase yang baik, dan tingkat penyerapan air tinggi. |
| BUDIDAYA | Zona Perumahan | Perumahan Kepadatan Sedang danPerumahan Kepadatan Rendah | 1) RTH |
| | | | a) Ruang terbuka hijau berupa taman bermain skala RT |
| | | | b) Ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 atau berlantai 1 atau lebih wajib menerapkan konsep “pekarangan hijau”. |
| | | | 2) RTNH : |
| | | | a) Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga skala kecil dan lahan parkir dengan bahan yang dapat menyerap air. |
| | | | 3) Fasilitas Perkotaan : |
| | | | a) Hidran halaman memilki mimimal suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit. |
| | | | b) Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan. |
| | | | 4) Jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter Prasarana Lingkungan serta: |
| | | | a) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. |
| | | | b) Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; |
| | | | c) Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok; |

| Kawasan | Zona | Sub Zona | KETENTUAN SARANA PRASARANA |
|----------|---------------------------|---|---|
| | | | d) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site); |
| | | | e) Drainase lingkungan tepi jalan dibuat sesuai kondisi topografi; |
| | | | f) Untuk rumah tanah, setiap rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah; |
| | | | g) Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT (250 penduduk) memiliki standar penyediaan 100 m ² dan skala RW (2.500 penduduk) memiliki standar penyediaan 400 m ² lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan publik; |
| | | | h) Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di pusat lingkungan hunian skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 m ² , dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan zon |
| | | | i) Penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di pusat lingkungan hunian skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m ² , dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan |
| | | | j) Memiliki titik kumpul evakuasi |
| | | | k) Pembangunan sumur resapan |
| BUDIDAYA | Zona Perdagangan dan Jasa | Perdagangan dan jasa Skala Kota, skala WP dan Skala SWP | Ketentuan Ruang Parkir |
| | | | a) Ketentuang Ruang Parkir minimal 5 meter dari batas GSB. |
| | | | b) Setiap pemilik bangunan yang memiliki kegiatan perdagangan dan jasa diwajibkan menyiapkan lahan parkir. Lahan parkir yang harus disediakan antara 10-30% dari luas persil. |
| | | | c) Fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa dianjurkan menggunakan off street parking (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan |
| | | | RTH : Ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan |
| | | | RTNH : Ruang terbuka non hijau berupa lahan parkir |
| | | | Jalur Pejalan Kaki : |
| | | | a) Lebar Minimal untuk jalur pejalan kaki 4 meter |
| | | | b) Dilengkapi dengan fasilitas pendukung pejalan kaki: drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, |
| | | | Utilitas Perkotaan : |
| | | | a) Penempatan kran kebakaran harus mudah dilihat dan dicapai oleh mobil pemadam kebakaran, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai Tata cara perencanaan bangunan lingkungan |
| | | | b) Untuk daerah komersial (kegiatan perdagangan dan jasa) jarak antara kran kebakaran 100 meter |
| | | | c) Prasarana Lingkungan |
| | | | m) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. |
| | | | n) Memiliki sarana air bersih minimal sumur bor atau sambungan PDAM dengan menyiapkan saran reservoir dan/atau sumur bor/gali |
| | | | o) Tong sampah setiap RKB dan (TPS) dengan minimal volume 50 liter. |
| | | | p) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) |
| | | | q) Memiliki titik kumpul evakuasi |
| | | | r) Pembangunan sumur resapan |

| Kawasan | Zona | Sub Zona | KETENTUAN SARANA PRASARANA |
|----------|----------------------------|--|--|
| BUDIDAYA | Zona Perkantoran | Perkantoran | 1) Ketentuan Ruang Parkir |
| | | | a) setiap bangunan perkantoran diwajibkan menyiapkan lahan parkir. Lahan parkir yang harus disediakan antara 5 - 30% dari luas persil. |
| | | | b) Fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa dianjurkan menggunakan off street parking (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan |
| | | | 2) RTH |
| | | | Ruang terbuka hijau berupa RTH Privat |
| | | | 3) RTNH |
| | | | Ruang terbuka non hijau berupa lahan parkir |
| | | | 4) Jalur Pejalan Kaki |
| | | | a) Lebar Minimal untuk jalur pejalan kaki 3 meter |
| | | | b) Dilengkapi dengan fasilitas pendukung pejalan kaki: drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, |
| | | | 5) Utilitas Perkotaan |
| | | | a) Penempatan kran kebakaran harus mudah dilihat dan dicapai oleh mobil pemadam kebakaran, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai Tata cara perencanaan bangunan lingkungan |
| | | | b) untuk daerah komersial (kegiatan perdagangan dan jasa) jarak antara kran kebakaran 100 meter |
| | | | 6) Prasarana Lingkungan |
| | | | a) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. |
| | | | b) Memiliki sarana air bersih minimal sumur bor atau sambungan PDAM dengan menyiapkan saran reservoir dan/atau sumur bor/gali |
| BUDIDAYA | Zona Sarana Pelayanan Umum | SPU Skala Kota, SPU Skala Kecamatan, SPU Skala Kelurahan, SPU Skala RW | c) Tong sampah setiap dengan minimal volume 50 liter. |
| | | | d) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) |
| | | | e) Memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan |
| | | | f) Pembangunan sumur resapan |
| | | | 1) Persyaratan pemanfaatan ruang : |
| | | | a) Pembangunan jalan di kawasan Pendidikan, rumah sakit dan area peribadatan harus memenuhi persyaratan: dapat melewati kendaraan pemadam kebakaran, perlindungan sipil, lebar jalan minimal 3,5 meter, terdapat fasilitas pejalan kaki, RTH dan penerangan jalan umum |
| | | | b) Memiliki minimum 6 ruang kelas @ 40 murid, dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka / bermain ± 3000-7000 m2 |
| | | | 2) Ketentuan Ruang Parkir : |
| | | | Setiap sekolah harus minimal menyiapkan lahan parkir untuk pegawai dan staf sekolah |
| | | | 3) RTH : |
| | | | Ruang terbuka hijau berupa RTH jalur hijau di tepi jalan dan RTH privat taman lingkungan sekolah. |
| | | | 4) RTNH : |
| | | | Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olah raga dan ruang parkir |
| | | | 5) Jalur Pejalan Kaki |
| | | | a) Jalur pejalan kaki di tepi jalan dengan pelayanan minimum standar B, Luas jalur pejalan kaki ≥ 3,6 m2 per orang dengan arus pejalan kaki >16-23 orang per menit per meter |
| | | | |

| Kawasan | Zona | Sub Zona | KETENTUAN SARANA PRASARANA |
|----------|----------------------------------|-----------------------------|---|
| BUDIDAYA | | | b) Dilengkapi fasilitas seperti jalur hijau, lampu, tempat duduk, pagar, tempat sampah, signange, shelter dan telepon umum. |
| | | | 6) Prasarana Lingkungan : |
| | | | a) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. |
| | | | b) Memiliki sarana air bersih minimal sumur bor atau sambungan PDAM dengan menyiapkan saran reservoir dan/atau sumur bor/gali |
| | | | c) Tong sampah setiap RKB dan (TPS) dengan minimal volume 50 liter. |
| | | | d) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) |
| | | | e) Setiap bangunan gedung harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. |
| | | | f) Penyediaan lahan parkir khusus bagi guru dan parkir umum bagi siswa dan tamu. |
| | | | g) Memiliki titik kumpul evakuasi |
| | | | h) Pembangunan sumur resapan |
| BUDIDAYA | Zona Kawasan Peruntukan Industri | Kawasan Peruntukan Industri | 1) Persyaratan Penggunaan Ruang : |
| | | | a) Setiap kapling harus mengikuti ketentuan BCR sesuai dengan ketentuan setempat (60:40) |
| | | | b) Fasilitas penunjang dapat berupa Kantin, Guest House, Tempat Ibadah, Fasilitas Olah Raga, PMK, WWTP, GI, Rumah Telkom dsb |
| | | | 2) RTH : |
| | | | Ruang terbuka hijau minimal 10% berupa jalur hijau, taman dan perimeter |
| | | | 3) RTNH : |
| | | | Ruang terbuka non hijau berupa trotoar dan ruang parkir |
| | | | 4) Jalur Pejalan Kaki |
| | | | a) Jalur pejalan kaki di tepi jalan dengan luas minimum 2 m. Pelayanan minimum standar B, luas jalur pejalan kaki $\geq 3,6$ m ² per orang dengan arus pejalan kaki >16-23 orang per menit per meter |
| | | | b) Dilengkapi fasilitas seperti jalur hijau, lampu, tempat duduk, pagar, tempat sampah, signange, shelter dan telepon umum. |

| Kawasan | Zona | Sub Zona | KETENTUAN SARANA PRASARANA |
|----------|-----------------|-------------------------------|---|
| | | | 5) Prasarana Lingkungan : |
| | | | a) Jalan dan Saluran struktur penggunaan (8-12%) |
| | | | b) Untuk tercapainya aksesibilitas di mana ada jalan primer dan jalan sekunder (pelayanan) |
| | | | c) Tekanan gandar primer sebaiknya minimal 8 ton dan sekunder minimal 5 ton |
| | | | d) Perkerasan jalan minimal 7 m |
| | | | e) Memiliki titik kumpul evakuasi |
| | | | f) Pembangunan sumur resapan |
| BUDIDAYA | Zona Pertanian | Tanaman Pangan dan Perkebunan | Aksesibilitas yang dapat dilewati oleh kendaraan yang dapat membawa hasil panen |
| | | | Sarana dan prasarana budidaya, panen dan pasca panen berupa jalan Usaha Tani (JUT) |
| | | | Sarana Pendukung Petanian |
| | | | pupuk dan pestisida pertanian serta alat dan mesin (alsintan) pertanian |
| BUDIDAYA | Zona Pariwisata | Pariwisata | 1) Ketentuan Ruang Parkir |
| | | | a) Setiap bangunan di kawasan pariwisata diwajibkan menyiapkan lahan parkir. Lahan parkir yang harus disediakan antara 5 - 30% dari luas persil. |
| | | | b) Fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang diizinkan di kawasan pariwisata dianjurkan menggunakan off street parking (parkir diluar badan jalan). Persyaratan untuk parkir diluar badan jalan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan serta kenyamanan. |
| | | | 2) RTH |
| | | | Ruang terbuka hijau berupa RTH |
| | | | 3) RTNH |
| | | | Ruang terbuka non hijau berupa lahan parkir, plaza |
| | | | 4) Jalur Pejalan Kaki |
| | | | a) Lebar Minimal untuk jalur pejalan kaki 3 meter |
| | | | b) Dilengkapi dengan fasilitas pendukung pejalan kaki: drainase, jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, |
| | | | 5) Utilitas Perkotaan |
| | | | a) Penempatan kran kebakaran harus mudah dilihat dan dicapai oleh mobil pemadam kebakaran, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai |
| | | | b) untuk daerah komersial (kegiatan perdagangan dan jasa) jarak antara kran kebakaran 100 meter |
| | | | 6) Prasarana Lingkungan |
| | | | a) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. |
| | | | b) Memiliki sarana air bersih minimal sumur bor atau sambungan PDAM dengan menyiapkan saran reservoir dan/atau sumur bor/gali |
| | | | c) Tong sampah setiap 50 meter dengan minimal volume 50 liter. |
| | | | d) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) |
| | | | e) Memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan |
| | | | f) Menyediakan jalan untuk kaum difabel |
| | | | g) Menyediakan toilet umum, mushollah |
| | | | 7) Ketentuan Lainnya |
| | | | Sesuai dengan Arahkan Geopark Merangin jambi |

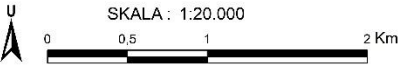
| Kawasan | Zona | Sub Zona | KETENTUAN SARANA PRASARANA |
|---|---------------------------------------|-------------------------|---|
| BUDIDAYA | Zona Pertahanan dan Keamanan | Pertahanan dan Keamanan | PRASARANA MINIMAL |
| | | | Jaringan Jalan |
| | | | Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat, berupa jalan utama dan jalan lingkungan |
| | | | Jalur pedestrian/pejalan kaki |
| | | | Tersedia jalur pedesterian/pejalan kaki untuk menghindari konflik pengguna jalan. |
| | | | Jaringan air bersih: |
| | | | Jaringan air bersih dilayani dengan kapasitas air bersih sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. |
| | | | Jaringan Listrik |
| | | | Jaringan listrik setiap kegiatan zona Perkantoran dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. |
| | | | Jaringan Persampahan |
| | | | Alat pengangkut dan Tempat pengumpulan sampah |
| | | | Jaringan Drainase: |
| | | | Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase. |
| | | | Jaringan Telekomunikasi |
| | | | Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi. |
| SARANA MINIMAL | | | |
| 1. Tempat parkir umum; 2. Pos jaga; 3. Fasilitas kesehatan; 4. Sistem pemadam kebakaran; 5. Mushola/tempat ibadah; 6. RTH. | | | |



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

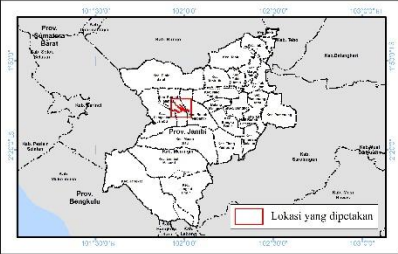
LAMPIRAN XX.1
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Wilayah Perencanaan |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| o Ibukota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas WP |
| • Ibukota Desa/ Kelurahan | --- Batas Desa/ Kelurahan | --- Batas SWP |
| | | --- Batas Blok |

RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDIDAYA

Zona Pertanian

P-1 Tanaman Pangan

KETENTUAN KHUSUS

Lahan Pertanian Pangan

Lahan Pertanian Pangan

Penjelasan Kode Lokasi



- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
 - Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
 - Pengolahan data tahun 2020 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

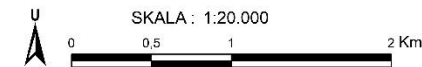
H. MUKTI



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

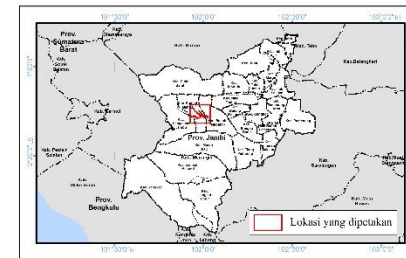
LAMPIRAN XX.2.A
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi

- Batas Kecamatan
- Batas Desa/ Kelurahan

Batas Wilayah Perencanaan

- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat

- RS Perlindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka Hijau

- RT01 Taman Kelurahan
- RT07 Pemakaman

ZONA BUDIDAYA

Zona Pertanian

- P1 Tanaman Pangan
- P3 Perkebunan

Zona Kawasan Peruntukan Industri

- KE Kawasan Peruntukan Industri

Zona Perumahan

- R3 Perumahan Kepadatan Sedang
- R4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum

- SPU1 SPU Skala Kota
- SPU3 SPU Skala Kelurahan
- SPU4 SPU Skala RW

Zona Perdagangan dan Jasa

- K1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K2 Perdagangan dan Jasa Skala WP

Zona Perkantoran

- K1 Perkantoran

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Rawan Bencana Banjir

- Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang

Penjelasan Kode Lokasi

- WP
- SWP
- Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/GT/PT/TRA/10/2020
- SK 6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 Provinsi Jambi
- Pengolahan data tahun 2020 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

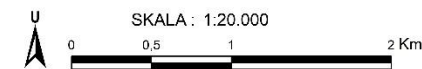
H. MUKTI



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

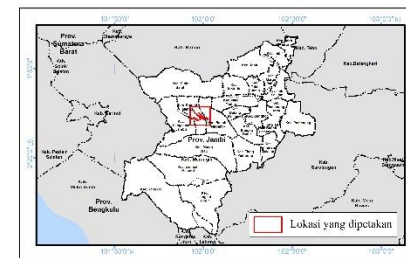
LAMPIRAN XX.2.B
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR BANDANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- o Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi

- Batas Kecamatan
- Batas Desa/ Kelurahan

Batas Wilayah Perencanaan

- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat

- PS Perindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka Hijau

- RT13 Taman Kelurahan
- RT17 Pemakaman

ZONA BUDIDAYA

Zona Pertanian

- P.1 Tanaman Pangan
- P.3 Perkebunan

Zona Perumahan

- R.3 Perumahan Kepadatan Sedang
- R.4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum

- SPU.3 SPU Skala Kelurahan
- SPU.3 SPU Skala RW

Zona Perdagangan dan Jasa

- K.1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K.2 Perdagangan dan Jasa Skala WP

Zona Perkantoran

- K1 Perkantoran

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang

- Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Sedang

Penjelasan Kode Lokasi

- W1
- SWP
- R.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/GT/PTRA/10/2020
- SK 6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 Provinsi Jambi
- Pengolahan data tahun 2020 - 2023

Catatan:

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

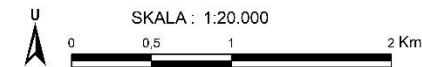
H. MUKTI



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

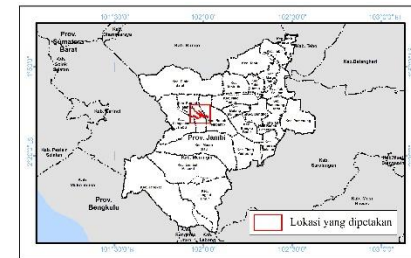
LAMPIRAN XX.2.C
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA GEMPA BUMI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Wilayah Perencanaan |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| o Ibukota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas WP |
| • Ibukota Desa/ Kelurahan | --- Batas Desa/ Kelurahan | --- Batas SWP |
| | | --- Batas Blok |

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

| Zona Perlindungan Setempat | Zona Ruang Terbuka Hijau |
|----------------------------|--------------------------|
| RS Perindungan Setempat | RT04 Taman Kecamatan |
| | RT04 Taman Kelurahan |
| | RT07 Pemakaman |

ZONA BUDIDAYA

| Zona Pertanian | Zona Perdagangan dan Jasa |
|-------------------------------|------------------------------------|
| P1 Tanaman Pangan | SPU3 SPU Skala Kelurahan |
| P2 Perkebunan | SPU4 SPU Skala RW |
| W Pariwisata | K1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota |
| | K2 Perdagangan dan Jasa Skala WP |
| Zona Perumahan | Zona Perkantoran |
| R3 Perumahan Kepadatan Sedang | KY Perkantoran |
| R4 Perumahan Kepadatan Rendah | Zona Peruntukan Lainnya |
| Zona Sarana Pelayanan Umum | PL3 Instalasi Pengolahan Air Minum |
| SPU01 SPU Skala Kota | Zona Pertahanan dan Keamanan |
| SPU02 SPU Skala Kecamatan | PT Pertahanan dan Keamanan |

KETENTUAN KHUSUS

| Kawasan Rawan Bencana |
|---|
| Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi |
| Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Sedang |

Penjelasan Kode Lokasi

| | |
|-----|-----|
| WSP | WSP |
| SWP | SWP |
| RWA | RWA |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plades perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/GT/PTRA/10/2020
3. SK 6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 Provinsi Jambi
4. Pengolahan data tahun 2020 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

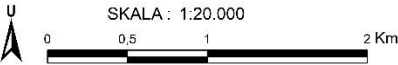
H. MUKTI



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

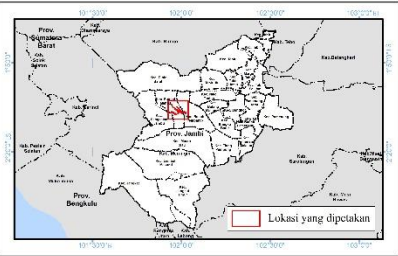
LAMPIRAN XX.2.D
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA TANAH LONGSOR



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- o Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi

- - - - - Batas Kecamatan
- - - - - Batas Desa/ Kelurahan

Batas Wilayah Perencanaan

- - - - - Batas WP
- - - - - Batas SWP
- - - - - Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat

- PS Perindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka Hijau

- RTK Taman Kelurahan

ZONA BUDIDAYA

Zona Pertanian

- P-1 Tanaman Pangan
- P-2 Perkebunan

Zona Perumahan

- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum

- SPU SPU Skala RW

Zona Perkantoran

- KT Perkantoran

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Rawan Bencana

- Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Longsor Tingkat Sedang

Penjelasan Kode Lokasi

- WP
- SWP
- Rik

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
- Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/GT/PTRA/10/2020
- SK 6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2020 Provinsi Jambi
- Pengolahan data tahun 2020 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

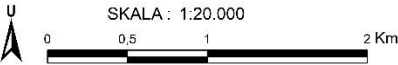
H. MUKTI



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

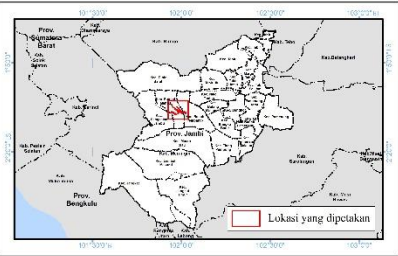
LAMPIRAN XX.3
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Ibukota Pemerintahan | Batas Administrasi | Batas Wilayah Perencanaan |
| o Ibukota Kecamatan | --- Batas Kecamatan | --- Batas WP |
| • Ibukota Desa/ Kelurahan | --- Batas Desa/ Kelurahan | --- Batas SWP |
| | | --- Batas Blok |

RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDIDAYA

Zona Sarana Pelayanan Umum

- SPU-1 SPU Skala Kota
SPU-3 SPU Skala Kelurahan

Zona Perkantoran

- K Perkantoran

KETENTUAN KHUSUS
Tempat Evakuasi

- Tempat Evakuasi Akhir
Tempat Evakuasi Sementara

Penjelasan Kode Lokasi



- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
 - Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
 - Pengolahan data tahun 2020 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

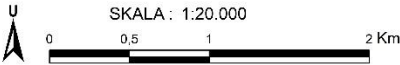
H. MUKTI



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

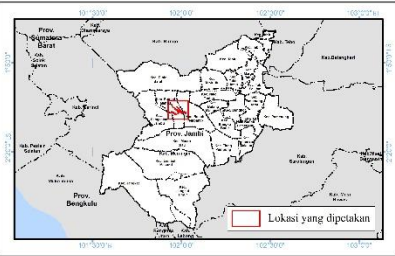
LAMPIRAN XX.4
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

o Ibukota Kecamatan

• Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi

--- Batas Kecamatan

--- Batas Desa/ Kelurahan

Batas Wilayah Perencanaan

--- Batas WP

--- Batas SWP

--- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDIDAYA

Zona Pertanian

P-1 Tanaman Pangan

P-3 Perkebunan

Zona Perumahan

R-3 Perumahan Kepadatan Sedang

R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Perdagangan dan Jasa

K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan

Sempadan Sungai

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok

- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
 2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/BIG/IGT/PTRA/10/2020
 3. Pengolahan data tahun 2020 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

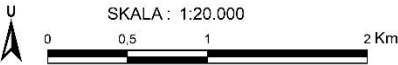
H. MUKTI



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
PROVINSI JAMBI

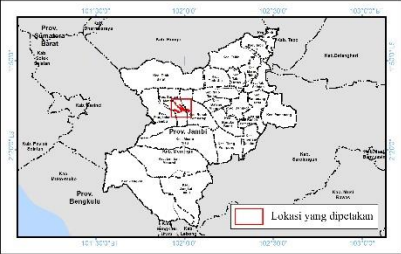
LAMPIRAN XX.5
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR .. TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN SUNGAI MANAU
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- o Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/ Kelurahan

Batas Administrasi

- Batas Kecamatan
- Batas Desa/ Kelurahan

Batas Wilayah Perencanaan

- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG

Badan Air

- BA Badan Air

Zona Perlindungan Setempat

- PS Perlindungan Setempat

ZONA BUDIDAYA

Badan Jalan

- BJ Badan Jalan

Zona Pertanian

- P-1 Tanaman Pangan
- P-3 Perkebunan

Zona Perumahan

- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum

- SPU-3 SPU Skala Kelurahan
- SPU-4 SPU Skala RW

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Sempadan

- Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Penjelasan Kode Lokasi



- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plaides perekaman tahun 2017 dan disesuaikan dengan Peta Indeks CSRT BIG Tahun 2013 s/d 2015
 - Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2020 Sesuai BA RDTR-64/IBG/IGT/PTRA/10/2020
 - Pengolahan data tahun 2020 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
PJ BUPATI MERANGIN

Ttd

H. MUKTI